

SKRIPSI

**PENGARUH PENGELUARAN KONSUMSI PEMERINTAH
DAN TINGKAT PARTISIPASI ANGKATAN KERJA (TPAK)
TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI REGIONAL
DI PROVINSI ACEH**



Disusun Oleh:

**NUR CAHYA
NIM. 180604034**

**PROGRAM STUDI ILMU EKONOMI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2022 M/1443 H**

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan dibawah ini

Nama : Nur Cahya
NIM : 180604034
Program Studi : Ilmu Ekonomi
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.***
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.***
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.***
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.***
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.***

Bila dikemudian hari ada tuntutan pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan isi saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 23 Juli 2022

Yang Menyatakan,



Nur Cahya

Nur Cahya

PERSETUJUAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Pengaruh Pengeluaran Konsumsi Pemerintah Dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Regional di Provinsi Aceh

Disusun Oleh:

Nur Cahya
NIM. 180604034

Disetujui untuk diseminarkan dan dinyatakan bahwa isi dan formatnya telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan dalam penyelesaian studi pada Program Studi Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raniry Banda Aceh

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Maimun, SE, Ak. M.Si
NIP. 197009171997031002


Rachmi Meutia, M.Sc
NIP. 198803192019032013

Mengetahui,
Ketua Program Studi Ilmu Ekonomi 

Dr. Muhammad Adnan, SE., M.Si
NIP. 197204281999031005

PENGESAHAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Pengaruh Pengeluaran Konsumsi Pemerintah Dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Regional di Provinsi Aceh

Telah Disidangkan oleh Dewan Penguji Skripsi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh
dan Dinyatakan Lulus serta Diterima Sebagai Salah Satu Syarat Studi untuk
Menyelesaikan Program Studi Strata 1 (S-1) dalam Bidang Ilmu Ekonomi

Pada Hari/Tanggal: Sabtu, 23 Juli 2022 M
22 Dzulhijjah 1443 H

Banda Aceh
Dewan Penguji Sidang Skripsi

Ketua

Dr. Maimun, SE, Ak. M.Si
NIP. 197009171997031002

Sekretaris

Rachmi Meutia, M.Sc
NIP. 198803192019032013

Penguji I

Dr. Hafas Furqani, M. Ec
NIP. 198006252009011009

Penguji II

Cut Elfida, S.HI., MA
NIDN. 2012128901

Mengetahui
Dewan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Dr. Zaki Fuad, M.Ag
NIP. 196403141992031003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
UPT. PERPUSTAKAAN

Jl. Syaikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7552921, 7551857, Fax. 0651-7552922
Web: www.library.ar-raniry.ac.id, Email: library@ar-raniry.ac.id

FORM PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH
MAHASISWA UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : Nur Cahya
NIM : 180604034
Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/Illmu Ekonomi
E-mail : 180604034@student.ar-raniry.ac.id

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah:

Tugas Akhir KKKU Skripsi

yang berjudul:

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Regional Di Provinsi Aceh

Berserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh berhak menyimpan, mengalih-media formatkan, mengelola, mendiseminasikan, dan mempublikasikannya di internet atau media lain.

Secara *fulltext* untuk kepentingan akademik tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencatumkan nama saya sebagai penulis, pencipta dan atau penerbit karya ilmiah tersebut.

UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh akan terbebas dari segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya,

Dibuat di : Banda Aceh
Pada Tanggal : 23 Juli 2022

Mengetahui

Penulis,

Nur Cahya
NIM. 180604034

Pembimbing I

Dr. Maimun, SE, Ak, M.Si
NIP. 197009171997031002

Pembimbing II

Rachmi Meutia, M.Sc
NIP. 198803192019032013

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala Puji dan Syukur bagi Allah SWT Tuhan Semesta Alam, dengan Rahmat, Hidayah dan Karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan judul penelitian, **Pengaruh Pengeluaran Konsumsi Pemerintah dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Regional di Provinsi Aceh.**

Skripsi ini disusun dengan maksud guna memenuhi persyaratan untuk mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi, Program Studi Ilmu Ekonomi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih atas bantuan yang telah diberikan kepada penulis, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam rangka penyelesaian penyusunan Skripsi ini, terutama kepada yang terhormat :
جام

1. Dr. Zaki Fuad, M.Ag. Selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Dr. Muhammad Adnan, SE., M.Si. Selaku Ketua Program Studi Ilmu Ekonomi dan Marwiyati, SE, MM. Sebagai Sekretaris Program Studi Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
3. Muhammad Arifin, Ph.D selaku Ketua Laboratorium dan Rachmi Meutia, M.Sc Selaku Asistem Laboratorium sekaligus

pembimbing II Prodi Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Ar-Raniry Banda Aceh. yang telah memudahkan rangkaian proses mulai dari pengajuan judul sampai dengan pelaksanaan Ujian Munaqasyah Sidang Skripsi ini.

4. Dr. Maimun, SE., Ak., M.Si. selaku dosen pembimbing I yang tidak bosan-bosannya memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis dalam penulisan Skripsi ini. Sehingga Skripsi ini dapat terselesaikan. Terima kasih atas bimbingan dan motivasi selama ini.
5. Dr. Hafas Furqani, M. Ec selaku dosen penguji I dan dosen penguji II yang telah banyak memberikan bimbingan dan arahan dalam penyempurnaan Skripsi ini.
6. Cut Elfida, S.HI., MA selaku Penasehat Akademik (PA) sekaligus dosen Penguji II yang telah memberikan saran dan nasehat kepada penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini dan seluruh staf pengajar dan karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
7. Segenap pelaku dan pengurus lembaga Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh yang telah memberikan bantuan, dukungan dan penyediaan data Statistik yang penulis butuhkan selama ini.
8. Terima kasih yang tidak terhingga kepada Ibunda dan Ayahnda, abang, kakak, adik dan keluarga tercinta yang selalu memberikan kasih sayang, semangat, waktu dan do'a serta dorongan moril maupun materil yang tak terhingga.

9. Terima kasih juga penulis ucapkan kepada sahabat-sahabat Indah Pramana, Nurul Farida dan Saidatun Nisa', Sri Wildani dimana telah memberikan dukungan besar serta semangat yang tiada hentinya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Skripsi ini dengan baik.
10. Terima kasih kepada seluruh teman-teman seperjuangan Letting 18 Ilmu Ekonomi yang telah mendukung dan memberikan semangat selama perkuliahan berlangsung di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Penulis menyadari bahwa penulisan Karya Ilmiah ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu kritik dan saran atau ide yang bersifat membangun dari semua pihak sangat diharapkan demi kesempurnaan Skripsi ini. Harapan penulis semoga Skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi perkembangan Ilmu Pengetahuan dalam bidang Ilmu Ekonomi pada umumnya dan yang terkait hasil penelitian di dalam penulisan karya ilmiah ini pada khususnya.

Banda Aceh, 23 Juli 2022

Penulis,

Nur Cahya

TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Materi P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987-Nomor:0543b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan	16	ط	T
2	ب	B	17	ظ	Ẓ
3	ت	T	18	ع	'
4	ث	Ṣ	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	Ḥ	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Ẓ	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	ه	H
13	ش	Sy	28	ء	'
14	ص	Ṣ	29	ي	Y
15	ض	Ḍ			

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong

a. Vokal Tunggal

Vokal Tunggal Bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal Rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara hakikat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
يَ	<i>Fathah dan ya</i>	Ai
وَ	<i>Fathah dan wau</i>	Au

Contoh:

Kaifa : كَيْفَ

Haula : هَوَّلَ

3. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
أَ	Fathah dan ya	Ā
يَ	Fathah dan wau	Ī
يِ	Dammah dan wau	Ū

Contoh:

qala: قَالَ

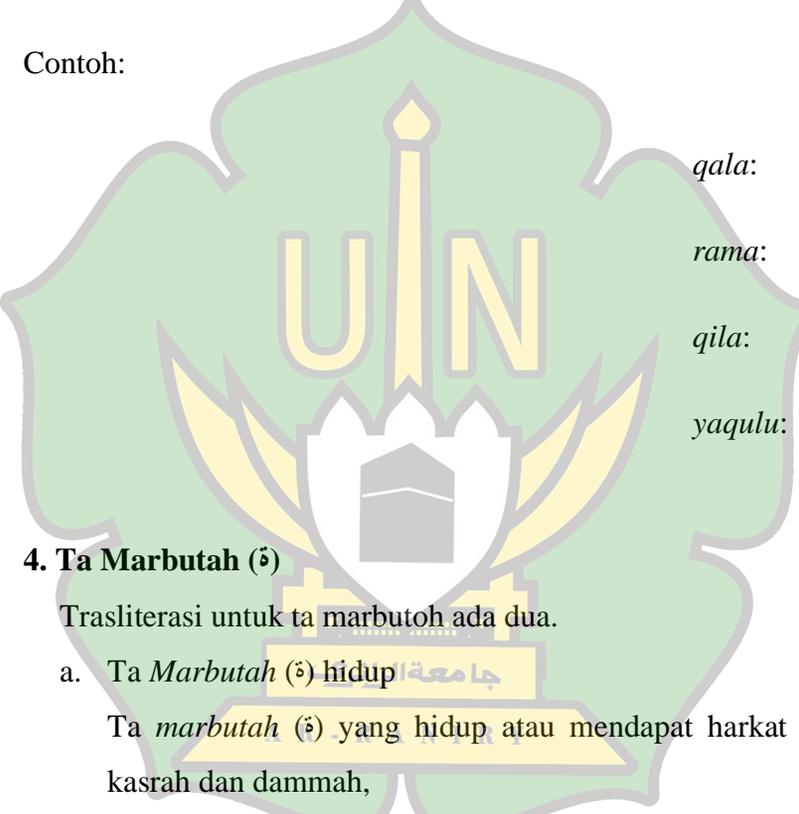
rama: رَمَى

qila: قِيلَ

yaqulu: يَقُولُ

4. Ta Marbutah (ة)

Trasliterasi untuk ta marbutoh ada dua.

- Ta Marbutah (ة) hidup 

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah t.
- Ta marbutah (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atas mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.
- Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta

bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

raudah al-atfal/raudatul atfal : رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ
al-madinah al-munawwarah/ : الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ
al-madinatul munawwarah
talhah : طَلْحَةُ

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi. Seperti M. Syuhudi Ismail, sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr, Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf

ABSTRAK

Nama : Nur Cahya
NIM : 180604034
Fakultas/Prodi : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam/
Ilmu Ekonomi
Judul : Pengaruh Pengeluaran Konsumsi Pemerintah dan
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)
Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Regional di
Provinsi Aceh
Pembimbing I : Dr. Maimun, SE,Ak. M.Si
Pembimbing II : Rachmi Meutia, S.E, S.Pd.I., M.Si

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan suatu negara. Pemerintah dapat melakukan berbagai kebijakan dalam mencapai tujuan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan untuk dapat tercapainya pertumbuhan ekonomi yang lebih baik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Pengeluaran Konsumsi Pemerintah dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Regional di Provinsi Aceh. Menggunakan metode kuantitatif berupa data sekunder. Data yang digunakan yaitu data Pengeluaran Konsumsi Pemerintah dan Tingkat Partisipasi Angkatan kerja selama 5 tahun. Analisis data adalah regresi data panel dengan pendekatan *Fixed Effect Model*. Hasil dari penelitian ini secara parsial menunjukkan bahwa Pengeluaran Konsumsi Pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi Regional di Provinsi Aceh. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja tidak berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi Regional di Provinsi Aceh. Secara simultan Pengeluaran Konsumsi Pemerintah dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Aceh.

Kata Kunci : Pengeluaran Konsumsi Pemerintah, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Pertumbuhan Ekonomi

DAFTAR ISI

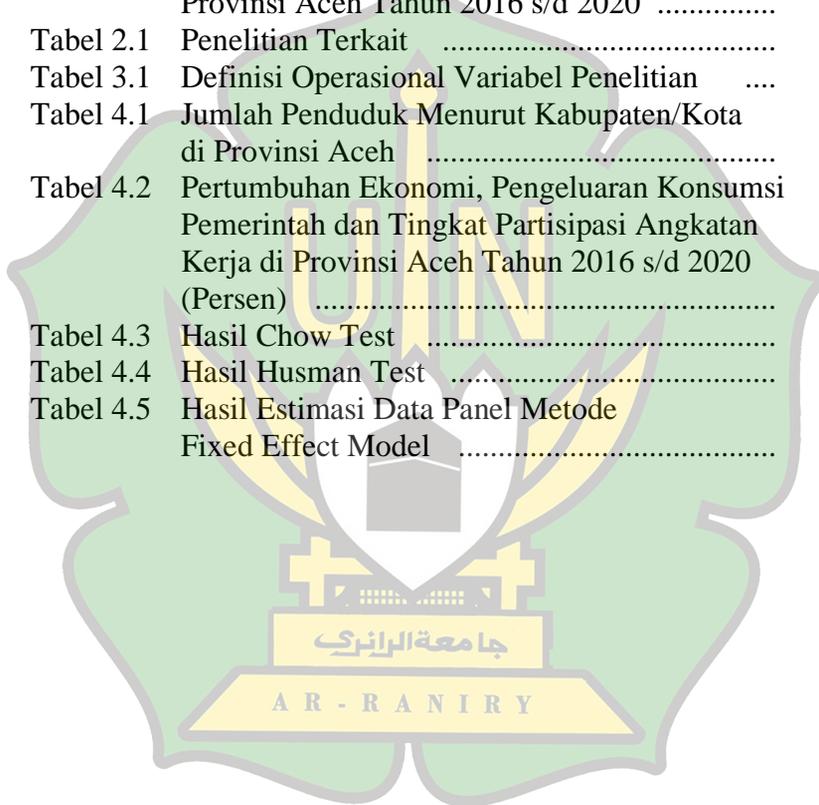
	Halaman
HALAMAN SAMPEL KEASLIAN	i
HALAMAN JUDUL KEASLIAN	ii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH	iii
PERSETUJUAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI	iv
PENGESAHAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI	v
PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	vi
KATA PENGANTAR	vii
HALAMAN TRANSLITERASI	x
ABSTRAK	xiv
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR TABEL	xviii
DAFTAR GAMBAR	xix
DAFTAR SINGKATAN	xx
DAFTAR RUMUS	xxi
DAFTAR LAMPIRAN	xxii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	13
1.3 Tujuan Penelitian	13
1.4 Manfaat Penelitian	14
1.5 Sistematika Penulisan	15
BAB II LANDASAN TEORI	17
2.1 Pertumbuhan Ekonomi Y	17
2.1.1 Pengertian Pertumbuhan Ekonomi ...	17
2.1.2 Teori Pertumbuhan Ekonomi	20
2.1.3 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi	24
2.1.4 Indikator Pertumbuhan Ekonomi ...	27
2.2 Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	28
2.2.1 Pengertian Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	28
2.2.2 Teori Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	31

2.2.3	Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pengeluaran Konsumsi Pemerintah .	33
2.2.4	Indikator Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	36
2.3	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	37
2.3.1	Pengertian Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	37
2.3.2	Teori Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	39
2.3.3	Faktor-Faktor yang mempengaruhi Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	40
2.3.4	Indikator Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	41
2.4	Hubungan Antar Variabel Penelitian	41
2.4.1	Pengaruh Pengeluaran Konsumsi Pemerintah terhadap Pertumbuhan Ekonomi Regional	41
2.4.2	Pengaruh Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Regional	42
2.5	Penelitian Terkait	43
2.6	Kerangka Berpikir	48
2.7	Hipotesis	49
BAB III	METODE PENELITIAN	50
3.1	Rancangan Penelitian	50
3.2	Jenis dan Sumber Data Penelitian	50
3.3	Populasi dan Sampel Penelitian	51
3.4	Variabel Penelitian	52
3.4.1	Variabel Terikat (Dependen)	52
3.4.2	Variabel Bebas (Independen)	52
3.4.3	Definisi Operasional Variabel	52
3.5	Model dan Metode Analisis Data	53
3.5.1	Model Analisis Data	53
3.5.2	Metode Analisis Data	54
3.5.3	Pemilihan Model Analisis Data	57

3.6 Pengujian Hipotesis	58
3.6.1 Uji Parsial (Uji T)	59
3.6.2 Uji Simultan/ Fisher (Uji F)	59
3.6.3 Uji Koefisien Determinasi (R^2)	60
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	61
4.1 Gambaran Umum Provinsi Aceh	61
4.2 Deskripsi Penelitian	63
4.2.1 Pertumbuhan Ekonomi	64
4.2.2 Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	66
4.2.3 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	67
4.3 Hasil Estimasi Regresi Data Panel	69
4.3.1 Chow Test	69
4.3.2 Husman Test	70
4.4 Hasil Estimasi Data Panel Metode <i>Fixed Effect Model</i>	71
4.5 Hasil Uji Signifikasi (Uji T)	73
4.6 Hasil Uji Simultan (Uji F)	73
4.7 Hasil Uji Koefisien Determinasi Estimasi R^2	74
4.8 Pembahasan Penelitian	74
4.8.1 Pengaruh Pengeluaran Konsumsi Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Aceh	74
4.8.1 Pengaruh Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Aceh	76
4.8.3 Pengaruh Secara Simultan Pengeluaran Konsumsi Pemerintah dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Regional di Provinsi Aceh	77
BAB V PENUTUP	78
5.1 Kesimpulan	78
5.2 Saran	79
DAFTAR PUSTAKA	81
LAMPIRAN	84

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Pertumbuhan Ekonomi Indonesia dan Provinsi Aceh Tahun 2016 s/d 2020	3
Tabel 1.2 Pengeluaran Konsumsi Pemerintah Provinsi Aceh Tahun 2016 s/d 2020	7
Tabel 1.3 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Provinsi Aceh Tahun 2016 s/d 2020	10
Tabel 2.1 Penelitian Terkait	44
Tabel 3.1 Definisi Operasional Variabel Penelitian	52
Tabel 4.1 Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh	62
Tabel 4.2 Pertumbuhan Ekonomi, Pengeluaran Konsumsi Pemerintah dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Provinsi Aceh Tahun 2016 s/d 2020 (Persen)	64
Tabel 4.3 Hasil Chow Test	69
Tabel 4.4 Hasil Husman Test	70
Tabel 4.5 Hasil Estimasi Data Panel Metode Fixed Effect Model	71



DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Skema Kerangka Pemikiran	48
Gambar 4.1 Peta Wilayah Provinsi Aceh	61
Gambar 4.2 Grafik Pertumbuhan Ekonomi Kab/Kota di Provinsi Aceh Tahun 2016 s/d 2020 (Persen)	65
Gambar 4.3 Grafik Pengeluaran Konsumsi Pemerintah Kab/Kota di Provinsi Aceh Tahun 2016 s/d 2020 (Persen)	66
Gambar 4.4 Grafik Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kab/Kota di Provinsi Aceh Tahun 2016 s/d 2020 (Persen)	68



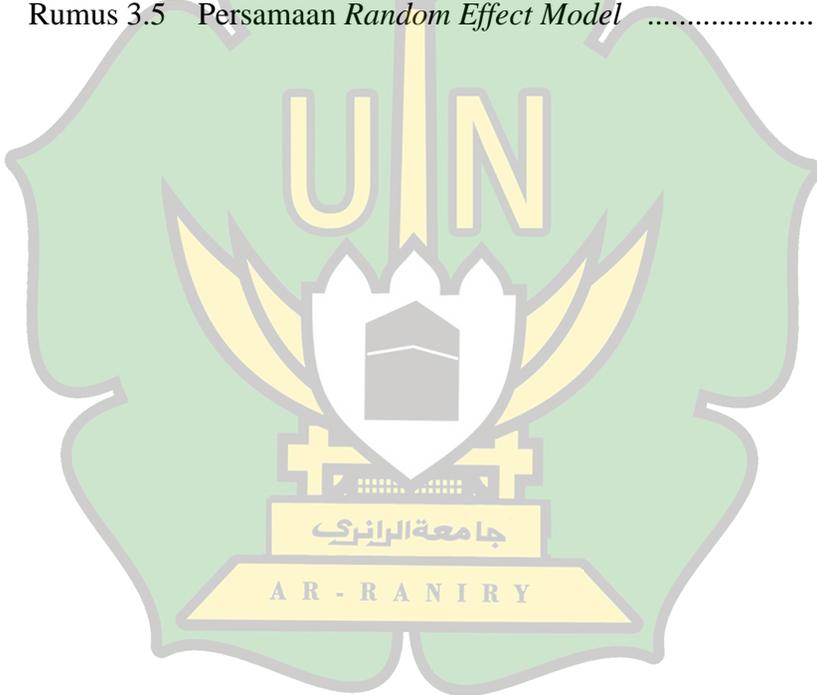
DAFTAR SINGKATAN

- PE : Pertumbuhan Ekonomi
- PKP : Pengeluaran Konsumsi Pemerintah
- TPAK : Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja
- APBN : Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
- APBD : Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
- BPS : Badan Pusat Statistik
- CEM : Common Effect Model
- FEM : Fixed Effect Model
- REM : Random Effect Model



DAFTAR RUMUS

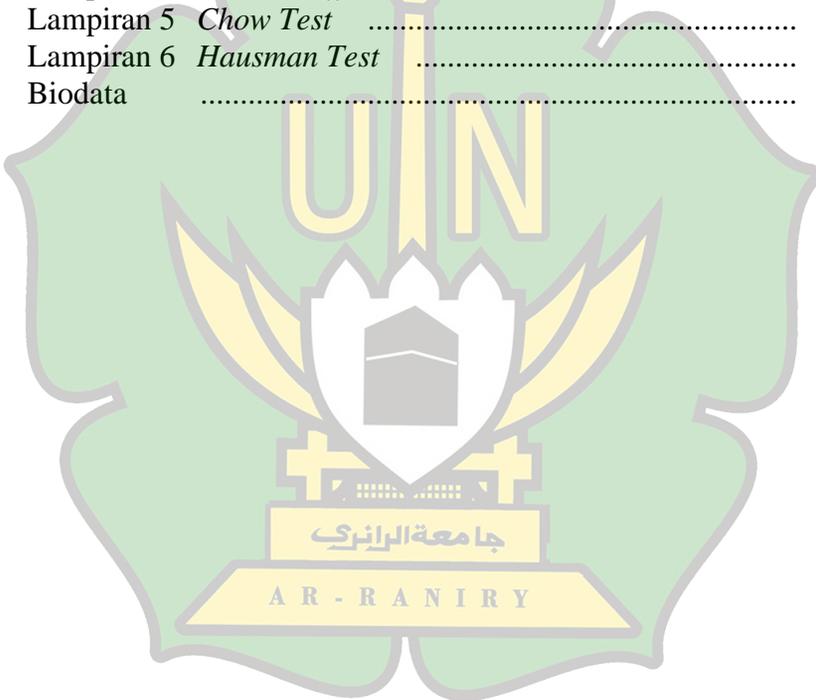
	Halaman
Rumus 2.1 Teori Pertumbuhan Ekonomi Neo-Klasik	23
Rumus 2.2 Indikator Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	41
Rumus 3.1 Persamaan Regresi Data Panel	53
Rumus 3.2 Persamaan Estimasi Regresi Data Panel	53
Rumus 3.3 Persamaan <i>Common Effect Model</i>	54
Rumus 3.4 Persamaan <i>Fixed Effect Model</i>	55
Rumus 3.5 Persamaan <i>Random Effect Model</i>	56



DAFTAR LAMPIRAN

Halaman

Lampiran 1	Data Pertumbuhan Ekonomi, Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PKP) dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Tahun 2016-2020 (Persen)	81
Lampiran 2	<i>Common Effect Model</i> (CEM)	88
Lampiran 3	<i>Fixed Effect Model</i> (FEM)	89
Lampiran 4	<i>Random Effect Model</i> (REM)	90
Lampiran 5	<i>Chow Test</i>	91
Lampiran 6	<i>Hausman Test</i>	92
Biodata	93



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan dapat meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat, sebab pertumbuhan ekonomi adalah suatu indikator untuk mengukur keberhasilan pembangunan suatu negara. Kemajuan atau ketidakmajuan suatu negara juga ditentukan oleh banyaknya output secara nasional, dengan adanya pembangunan ekonomi maka akan mendorong pertumbuhan ekonomi, begitu juga sebaliknya, pertumbuhan ekonomi akan memperlancar proses pembangunan ekonomi suatu negara. Adanya pertumbuhan ekonomi yang tinggi dalam suatu negara maka tingkat kesejahteraan masyarakat akan dapat meningkat dan hal ini juga dapat menyerap tenaga kerja yang lebih banyak dalam perekonomian negara tersebut.

Pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai kebijakan dalam mencapai tujuan pembangunan ekonomi berkelanjutan. Kebijakan yang telah dilakukan pemerintah seperti meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan menstabilitas perekonomian secara umum. Dalam hal terjadinya kenaikan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan pesatnya pembangunan ekonomi dapat membawa dampak pada meningkatnya standar hidup dan kesejahteraan masyarakat, dimana peningkatan standar hidup masyarakat, tidak hanya terjadi pada peningkatan pendapatan, namun juga terjadi pada peningkatan permintaan konsumsi terhadap barang dan jasa

publik, baik berasal dari segi kualitas juga berasal dari segi kuantitas.

Menurut Sukirno (2012:423), pertumbuhan ekonomi adalah perkembangan fiskal produksi barang dan jasa yang berlaku di suatu negara, seperti penambahan jumlah produksi barang industri, perkembangan infrastruktur, penambahan jumlah sekolah, pembangunan jalan tol, penambahan produksi sektor jasa dan penambahan produksi sektor modal yang biasa digambarkan dengan tingkat pertumbuhan pendapatan nasional riil yang dicapai.

Beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi ialah dengan meningkatkan pengeluaran pemerintah secara agregat. Hal ini sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh pendapat Keynes yang menyatakan bahwa keputusan pengeluaran konsumsi pemerintah sangat mempengaruhi perekonomian disuatu negara baik dalam jangka pendek juga dalam jangka panjang. Pada jangka panjang konsumsi memiliki peran dalam menentukan permintaan agregat, sedangkan pada jangka pendek konsumsi memiliki peran besar terhadap pertumbuhan ekonomi (Samuelson, 2020).

Proses terjadinya pertumbuhan ekonomi dimana kenaikan pendapatan nasional riil, suatu perekonomian dapat tumbuh dan berkembang jika terjadinya pertumbuhan output riil. Perubahan pertumbuhan ekonomi dapat, meliputi: peningkatan, statis, maupun penurunan, dimana pertumbuhan adalah perubahan yang bersifat

positif atau peningkatan, statis yang bersifat tetap, sedangkan penurunan merupakan perubahan negatif atau penurunan.

Untuk melihat tingkat pertumbuhan ekonomi suatu negara atau wilayah, dapat terlihat dari perbandingan pendapatan nasional suatu negara atau wilayah dalam beberapa tahun yang dapat dihitung berdasarkan harga konstan. Pertumbuhan ekonomi di wilayah Aceh pada tahun 2020 mengalami penurunan yang signifikan dikarenakan akibat adanya wabah virus COVID-19 yang melanda di berbagai daerah Aceh. Berikut tabel Pertumbuhan Ekonomi Indonesia dan Provinsi Aceh :

Tabel 1.1
Pertumbuhan Ekonomi Indonesia dan Provinsi Aceh
Tahun 2016 s/d 2020

Tahun	Perumbuhan Ekonomi Indonesia (%)	Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Aceh (%)
2016	5,07	3,29
2017	5,07	4,18
2018	5,17	4,61
2019	5,02	4,14
2020	-2,07	-0,37

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh (2021)

Berdasarkan data Tabel 1.1 dapat terlihat Pertumbuhan Ekonomi Indonesia, dalam lima tahun terakhir (2016 s/d 2020) mengalami fluktuasi, dimana yang tertinggi terdapat pada tahun 2018 sebesar 5.17% dan yang terendah terdapat pada tahun 2020 sebesar -2,07%. Data Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Aceh dari data Tabel 1.1 juga terlihat mengalami fluktuasi dalam lima tahun

terakhir (2016 s.d 2022) dimana yang paling tinggi terdapat pada tahun 2018 sebesar 4,61% dan yang paling rendah terdapat pada tahun 2020 yaitu -0,37%. Penyebab utama turunnya Pertumbuhan Ekonomi Indonesia dan di Provinsi Aceh pada tahun 2020, hal ini sangat dipengaruhi oleh mewabahnya Corona Virus (COVID-19) yang menyebabkan perekonomian Indonesia dan di Provinsi Aceh mengalami pelemahan / penurunan pertumbuhan ekonomi.

Pengeluaran pemerintah merupakan bagian dari kebijakan fiskal pemerintah yakni, suatu tindakan pemerintah dalam mengatur perekonomiannya yang bertujuan menentukan besarnya penerimaan dan pengeluaran pemerintah pada setiap tahunnya, yang terdapat dalam dokumen Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) untuk nasional dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) untuk daerah atau regional. Kebijakan fiskal pemerintah bertujuan untuk menstabilkan tingkat harga, tingkat output, maupun kesempatan kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi (Sukirno, 2014 : 12).

Pengeluaran pemerintah melalui APBN tercerminkan dalam realisasi belanja rutin dan belanja pembangunan, sedangkan jumlah keseluruhan penerimaan meliputi penerimaan dalam negeri dan penerimaan luar negeri, termasuk penerimaan pembangunan. Pengeluaran rutin yaitu pengeluaran operasional yang mutlak harus dilakukan serta konsumtif, tetapi tidak semua anggaran belanja rutin dapat dikategorikan sebagai pengeluaran konsumsi, misalnya

seperti belanja pemeliharaan gedung kantor, belanja pembelian inventaris kantor dan lain-lain.

Pengeluaran pemerintah dapat dilihat pada belanja langsung dan belanja tidak langsung, Belanja langsung yaitu belanja yang ditentukan secara langsung oleh adanya program atau kegiatan yang direncanakan. Jenis belanja langsung dapat berupa Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Pemeliharaan serta Belanja Dinas. Keberadaan anggaran belanja langsung ialah konsekuensi adanya program atau kegiatan. Belanja langsung merupakan input (alokasi belanja) yang ditetapkan dapat diukur dan diperbandingkan dengan output yang dihasilkan variabilitasnya. Adapun jumlah komponen belanja langsung sebagian besar ditentukan oleh sasaran kinerja (tingkat pencapaian program atau kegiatan) yang diharapkan.

Belanja tidak langsung ialah belanja yang tidak ditentukan secara langsung oleh adanya program atau kegiatan. Jenis belanja tidak langsung bisa berupa belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja pemeliharaan serta belanja perjalanan dinas. Keberadaan anggaran belanja tidak langsung bukan merupakan konsekuensi ada atau tidaknya suatu program kegiatan. Belanja tidak langsung digunakan secara periodik (umumnya bulanan) dalam rangka koordinasi penyelenggaraan kewenangan pemerintah daerah yang bersifat umum.

Pengeluaran pemerintah mencerminkan kebijakan pemerintah. Apabila pemerintah telah menetapkan suatu kebijakan dalam membeli barang dan jasa, pengeluaran pemerintah yang mencerminkan biaya yang harus dikeluarkan oleh pemerintah dalam melaksanakan kebijakan tersebut. Penerimaan dan pengeluaran pemerintah hal ini terdapat pada pendapatan dan belanja negara yang dapat dilakukan dalam bentuk intervensi secara langsung ataupun tidak langsung.

Pengeluaran konsumsi pemerintah merupakan nilai seluruh jenis output pemerintah dikurangi nilai hasil output dalam pembentukan modal sendiri dikurangi nilai penjualan barang/jasa (baik yang harganya signifikan maupun tidak signifikan secara ekonomi) ditambah nilai barang/jasa yang dibeli dari produsen pasar untuk diberikan kepada rumah tangga secara gratis atau dengan harga yang tidak signifikan secara ekonomi (*sosial transfer in kind purchased market production*), (Badan Pusat Statistik Aceh, 2020).

Pengeluaran konsumsi pemerintah ialah jumlah seluruh pengeluaran pemerintah yang meliputi: pembelian barang dan jasa (belanja barang), pembayaran balas jasa pegawai (belanja pegawai) dan penyusutan barang modal. Dikurangi dengan : Hasil penjualan barang dan jasa (Output pasar) pemerintah yang tidak dapat dipisahkan dari kegiatan pemerintah (yang bukan dikonsumsi oleh pemerintah).

Pengeluaran konsumsi merupakan pengeluaran rutin negara dalam hal belanja pegawai. Dana rutin daerah dan pengeluaran rutin lainnya dapat berdampak pada konsumsi pegawai atau masyarakat terhadap barang-barang meningkat yang kemudian dapat menaikkan fungsi konsumsi dan menyumbang kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi. Dalam hal peningkatan belanja pegawai dapat menyebabkan kenaikan pada produksi yang dapat diukur dengan PDRB. Meningkatnya belanja barang dan jasa juga dapat memberikan dampak yang positif terhadap peningkatan produksi nasional, provinsi serta daerah kabupaten/kota. Peningkatan belanja barang dan jasa juga akan dapat meningkatnya penyerapan tenaga kerja pada masing-masing sektor perekonomian yang ada.

Tabel 1.2
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah di Provinsi Aceh
Tahun 2016 s/d 2020

Tahun	Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (%)
2016	-16,82
2017	4,79
2018	4,05
2019	7,48
2020	-8,06

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh (2021)

Pada Tabel 1.2 Pengeluaran Konsumsi Pemerintah di Provinsi Aceh paling tinggi pada tahun 2019 dengan jumlah sebesar 7,48%. sedangkan Pengeluaran Konsumsi Pemerintah di

Provinsi Aceh paling sedikit berada pada tahun 2020 dengan jumlah sebesar -8,77%. Hal ini menunjukkan bahwa pandemi COVID-19 sangat berpengaruh dan berdampak negatif terhadap pengeluaran konsumsi Pemerintah Aceh.

Tenaga kerja merupakan modal bergeraknya roda pembangunan perekonomian suatu negara. Tenaga kerja akan terus mengalami perubahan dengan berlangsungnya proses demografi. Pertumbuhan ekonomi yang terus meningkat juga didukung oleh adanya ketersediaan tenaga kerja dalam hal pekerja ahli ataupun pekerja kasar (buruh), pembangunan ketenagakerjaan masih sangat perlu dibantu dengan adanya upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia. Dengan demikian peranan ini sejalan dengan sumber daya pemuda sebagai salah satu tenaga pelaksana pembangunan yang secara langsung ataupun tidak langsung turut menentukan langkah karakteristik dalam keberhasilan pembangunan. Indikator yang sering digunakan dalam ketenagakerjaan yaitu Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK).

Menurut Badan Pusat Statistik (2020), TPAK (Labor Force Participation Rate) merupakan proporsi Angkatan Kerja (AK) pada proporsi usia kerja. Sedangkan Angkatan Kerja (AK) merupakan Jumlah total orang atau individu yang saat ini bekerja atau sedang mencari pekerjaan. Individu yang tidak mencari pekerjaan seperti pelajar penuh waktu, ibu rumah tangga, dan individu yang berusia diatas 64 tahun.

Indikator tingkat partisipasi angkatan kerja memiliki peran sentral dalam studi tentang faktor-faktor yang menentukan ukuran dan komposisi sumber daya manusia suatu negara dalam membuat proyeksi pasokan tenaga kerja di masa depan. Hal ini juga digunakan untuk merumuskan kebijakan ketenagakerjaan, untuk menentukan kebutuhan pelatihan dalam menghitung masa kerja yang diharapkan dari populasi pria dan wanita. Indikator ini juga berguna untuk memahami perilaku pasar tenaga kerja dari berbagai segmen populasi. Tingkat dan pola tingkat partisipasi angkatan kerja tergantung pada kesempatan kerja dan permintaan pendapatan, yang mungkin berbeda dari satu kategori orang ke kategori lainnya. Sebagai contoh, penelitian telah menunjukkan bahwa tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan bervariasi secara sistematis, pada usia tertentu, dengan status perkawinan dan tingkat pendidikan mereka. Ada juga perbedaan penting dalam tingkat partisipasi penduduk perkotaan dan pedesaan, dan di antara kelompok sosial-ekonomi yang berbeda.

Pada Teori Sollow-Swan Pertumbuhan ekonomi berkaitan dengan ketersediaannya terhadap faktor-faktor produksi yaitu penduduk, akumulasi modal, tenaga kerja maupun tingkat kemajuan teknologi. Teori ini mengemukakan bahwa rasio modal output dapat mengalami perubahan yang berbeda-beda. Dalam menghasilkan sejumlah output tertentu dapat menggunakan kombinasi modal dan tenaga kerja yang berbeda-beda (Arsyad, 2010 : 89).

Selain itu TPAK merupakan indikator yang mempengaruhi besarnya output suatu kegiatan perekonomian. oleh karena itu, semakin banyak masyarakat yang produktif, maka akan semakin menghasilkan output yang lebih tinggi dan dapat mempengaruhi PDRB. Hal ini juga dapat mempengaruhi pada pendapatan perkapita. Meningkatnya TPAK di suatu daerah, dapat meningkatkan pendapatan perkapita dan tingkat konsumsi yang dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi regional.

(Mulyadi S, 2017 dalam Fadillah, 2020), pada teori Lewis yang mengatakan bahwa kelebihan pekerja adalah kesempakatan dan bukan suatu masalah. Kelebihan pekerja satu sektor dapat memberikan adil pada pertumbuhan output atau penyediaan pekerja di sektor lainnya. Dengan adanya kelebihan penawaran tenaga kerja tidak dapat memberikan masalah pada pembangunan ekonomi. Sebaiknya kelebihan pekerja justru adalah modal kapasitas modern yang berjalan lancar dan perpindahannya tidak akan pernah menjadi terlalu banyak.

AR - R Tabel 1.3
Tingkat Partisipasi Angkatan kerja (TPAK)
di Provinsi Aceh (Tahun 2016 s/d 2020)

Tahun	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) (%)
2016	64,26
2017	63,74
2018	64.04
2019	63,13
2020	65,10

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh diolah (2021)

Tabel 1.3 Menunjukkan bahwa Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Provinsi Aceh paling tinggi terjadi pada tahun 2020 sebesar 65,10 % dan yang terendah pada tahun 2019 sebesar 63,13%.

Menurut Mia Fadillah (2020) pertumbuhan ekonomi ialah salah satu indikator utama dalam keberhasilan suatu negara. Apabila ekonomi suatu negara tumbuh dapat dengan cepat maka pembangunan dari negara tersebut mengalami kemajuan. Seperti tersediaannya fasilitas, infrastruktur dan sarana prasarana lainnya. Ketersediaan itu semua tentu akan berpengaruh terhadap kinerja dari tenaga kerja untuk membangun sebuah kemajuan terhadap negara tersebut. Untuk memenuhi kebutuhan negara tentu diperlukannya biaya agar dapat terwujudnya pembangunan suatu negara. Dimana negara menggunakan pendapatannya yang didapatkan dari penerimaannya yang kemudian dibelanjakan untuk keperluan negara. Pendapatan dan belanja negara diatur dalam anggaran pendapatan, belanja negara (APBD). Sehingga anggaran pendapatan negara dapat disesuaikan dengan pengeluarannya.

Maka dalam penelitian ini menyatakan bahwa Pengeluaran Konsumsi Pemerintah dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja yang diharapkan dapat berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi Regional di Provinsi Aceh.

Penelitian yang dilakukan oleh Mia (2020) menunjukkan bahwa variabel angkatan kerja tidak berpengaruh signifikan dan positif terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia, pengeluaran pemerintah berpengaruh signifikan dan negatif terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

Penelitian yang dilakukan oleh Aisyah (2019) menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah menggunakan data belanja yang dilakukan Pemerintah Sumatera Barat berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Sumatera Barat, dan tingkat partisipasi angkatan kerja berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Sumatera Barat

Penelitian yang dilakukan oleh Ari, Whinarko dan Rian (2018), menunjukkan bahwa variabel pengeluaran konsumsi pemerintah secara parsial menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia tahun 1988 s/d 2017.

Berdasarkan latar belakang yang telah di paparkan diatas peneliti tertarik melakukan penelitian ini dengan judul **“Pengaruh Pengeluaran Konsumsi Pemerintah dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Regional di Provinsi Aceh”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang yang telah dikemukakan sebelumnya, Penulis membuat rumusan masalah dalam penulisan karya ilmiah ini, sebagai berikut :

1. Apakah Pengeluaran Konsumsi Pemerintah berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi Regional di Provinsi Aceh.?
2. Apakah Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi Regional di Provinsi Aceh.?
3. Apakah Pengeluaran Konsumsi Pemerintah dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) secara simultan berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi Regional di Provinsi Aceh.?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian dalam penulisan karya ilmiah ini, adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui apakah Pengeluaran Konsumsi Pemerintah berpengaruh Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Aceh.
2. Untuk mengetahui apakah Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) berpengaruh Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Aceh.
3. Untuk mengetahui apakah Pengeluaran Konsumsi Pemerintah dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) secara

bersama (Simultan) berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi Regional di Provinsi Aceh.?

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diperoleh dari hasil penelitian dalam penulisan karya ilmiah ini, adalah sebagai berikut :

1) Secara Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi atau masukan bagi perkembangan ilmu ekonomi regional di Provinsi Aceh, mengenai pengaruh dari besaran Pengeluaran Konsumsi Pemerintah Aceh dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Provinsi Aceh terhadap Pertumbuhan Ekonomi Regional di Provinsi Aceh.

2) Secara Praktis

a. Bagi Penulis

Untuk menambah khazanah keilmuan dan wawasan yang bermanfaat Mengenai Pengeluaran Konsumsi Pemerintah dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) terhadap Pertumbuhan Ekonomi Regional di Provinsi Aceh

b. Bagi Universitas

Sebagai bahan referensi bagi penelitian lebih lanjut yang berhubungan dengan permasalahan yang akan di teliti oleh para penulis atau peneliti lainnya, mengenai Pengeluaran Konsumsi Pemerintah dan Tingkat Partisipasi Angkatan

Kerja (TPAK) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Regional di Provinsi Aceh.

3) Secara Kebijakan

Pemerintah Kabupaten/ Kota di Provinsi Aceh dapat memperoleh masukan berupa informasi yang bermanfaat dan berguna, dalam mengambil kebijakan terhadap pertumbuhan ekonomi regional, menyangkut dengan Pengaruh Pengeluaran Konsumsi Pemerintah dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) terhadap Pertumbuhan Ekonomi Regional di Provinsi Aceh.

1.5 Sistematika Penulisan

Dalam suatu penelitian untuk penulisan karya tulis ilmiah, tentu sangat diperlukan adanya bentuk sistematika penulisan yang baik dan tepat, sesuai dengan Buku Petunjuk dan Pedoman Penulisan Skripsi yang diterbitkan oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. Untuk itu dalam sistematika penulisan proposal skripsi ini, akan dituangkan dalam bentuk penulisan sebagai berikut :

Bab I : Pendahuluan

Pada bab satu berupa pendahuluan, menjelaskan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II : Landasan Teori

Pada bab dua berupa landasan teori, menjelaskan tentang landasan teori pertumbuhan ekonomi, pengeluaran konsumsi pemerintah, tingkat partisipasi angkatan kerja, hubungan antar variable penelitian, penelitian terkait, kerangka berpikir dan hipotesis.

Bab III : Metode Penelitian

Pada bab tiga berupa metode penelitian, menjelaskan tentang rancangan penelitian, jenis dan data penelitian, populasi dan sampel penelitian, variabel penelitian, model dan metode analisis data serta pengujian hipotesis yang dipakai dalam penelitian ini.

Bab IV : Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pada bab empat berupa hasil penelitian dan pembahasan, menjelaskan gambaran umum provinsi Aceh, deskripsi penelitian, estimasi regresi data panel dan pembahasan hasil penelitian.

Bab V : Penutup

Pada bab lima berupa penutup, menjelaskan kesimpulan penelitian dan saran-saran.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Pertumbuhan Ekonomi

2.1.1 Pengertian Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi suatu daerah atau negara dapat ditandai oleh tinggi atau rendahnya laju pertumbuhan ekonomi daerah atau negara tersebut. Dalam hal terjadinya peningkatan pertumbuhan ekonomi, maka secara *agregat* hal ini dapat ditandai oleh tingkat kesejahteraan ekonomi masyarakat yang meningkat. Sementara itu jika terjadi keadaan pertumbuhan ekonomi yang rendah dengan tingkat pertumbuhan ekonomi negatif, maka secara umum menunjukkan tingkat kesejahteraan ekonomi masyarakat yang menurun. Adapun disisi yang lain pertumbuhan ekonomi juga dapat digunakan sebagai alat analisis untuk mengevaluasi tepat atau tidaknya kebijakan pembangunan yang telah di ambil, sehubungan dengan peran pemerintah dalam perekonomian daerah atau negara.

Pertumbuhan ekonomi juga merupakan indikator dalam mengukur keberhasilan pembangunan ekonomi suatu daerah atau negara. Peningkatan perekonomian di suatu daerah atau Negara dapat ditentukan oleh besarnya pertumbuhan ekonomi yang ditunjukkan oleh perubahan output nasional. Apabila terjadi perubahan pada output nasional dalam suatu perekonomian, dapat ditunjukkan oleh perhitungan pertumbuhan ekonomi dalam jangka pendek. Pada teori pertumbuhan ekonomi dapat dikelompokkan

menjadi dua, yaitu: teori pertumbuhan ekonomi klasik dan teori pertumbuhan ekonomi modern (Sukirno, 2012 : 433).

Pada teori pertumbuhan ekonomi klasik, berdasarkan analisis pada kepercayaan dan efektivitas mekanisme pasar bebas. dalam teori klasik ini terdapat dua tokoh yang penting dalam era klasik yaitu Adam Smith dan David Ricardo. Smith dan Ricardo meyakini bahwa pertumbuhan ekonomi memiliki batas ketersediaan tanah. Kaum klasik juga meyakini bahwa pertumbuhan ekonomi tercapai dengan adanya pembentukan dari akumulasi modal yang bersumber pada surplus ekonomi.

Pada Teori lain menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi ialah teori ekonomi modern. Teori Harrod-Domar bertujuan menerangkan syarat yang harus di penuhi supaya perekonomian dapat mencapai pertumbuhan yang teguh atau *steady growth* dalam jangka panjang. Pada analisis dua sektor, investasi harus terus mengalami kenaikan supaya perekonomian tersebut mengalami pertumbuhan yang berkepanjangan. Pertambahan investasi sangat dibutuhkan dalam meningkatkan pengeluaran *agregat*. Investasi bukan hanya berpengaruh terhadap permintaan agregat tetapi dapat berpengaruh juga terhadap penawaran *agregat* melalui adanya pengaruh terhadap kapasitas produksi. Dengan adanya prespektif yang lebih panjang maka investasi akan menambah stok kapital (Sukirno, 2012 : 433).

Semakin tingginya investasi, hal ini dapat menunjukkan semakin baiknya perekonomian suatu daerah atau negara tersebut. Investasi tidak hanya memiliki pengaruh terhadap permintaan *agregat* akan tetapi juga terhadap penawaran *agregat*, melalui peningkatan kapasitas produksi barang dan jasa. Dalam perspektif jangka panjang investasi akan menambah stok kapital, yang dapat menunjukkan terjadinya pertumbuhan ekonomi melalui kenaikan output perkapita dalam jangka panjang.

Pertumbuhan ekonomi juga dapat menunjukkan terjadinya perkembangan perekonomian yang dapat menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi oleh masyarakat bertambah dan dapat meningkatnya kemakmuran bagi masyarakatnya. Permasalahan pertumbuhan ekonomi juga dapat dilihat sebagai permasalahan makro ekonomi dalam jangka panjang, melalui perkembangan dalam hal kemampuan memproduksi barang dan jasa sebagai akibat dari penambahan faktor-faktor pertumbuhan ekonomi. Adapun pada Produksi itu sendiri umumnya tidak selalu diikuti oleh peningkatan pertumbuhan produksi barang dan jasa yang sama besarnya. Hal ini dikarenakan pertumbuhan potensi memproduksi barang dan jasa, seringkali lebih besar dari pertumbuhan produksi yang sebenarnya (Sukirno, 2012 : 423).

2.1.2 Teori Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi ialah suatu bidang penyelidikan yang sering kali dibahas oleh para ahli ekonomi. Pada kenyataannya analisis ekonomi mempunyai sebab-sebab dapat terjadinya pertumbuhan ekonomi dan faktor-faktor yang dapat menentukan pertumbuhan ekonomi (Sukirno, 2012 : 432).

a) Teori Pertumbuhan Klasik.

Menurut pandangan para ahli ekonomi klasik terdapat empat faktor yang dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, adalah: 1) Jumlah Penduduk; 2) Jumlah Stok Barang-barang Modal; 3) Luas Tanah dan Kekayaan Alam; serta 4) Tingkat Teknologi yang digunakan. Meskipun pertumbuhan ekonomi seringkali bergantung kepada banyaknya faktor, para ahli ekonomi klasik tetap menitikberatkan perhatiannya pada pengaruh pertambahan penduduk terhadap pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi bukan hanya berlangsung secara terus menerus jika penduduk dalam suatu daerah sedikit dan kekayaan alamnya relatif lebih banyak serta tingkat pengembalian modal dari investasi yang dibuat juga lebih tinggi, maka pengusaha akan mendapatkan keuntungan yang lebih besar sehingga menimbulkan investasi yang baru dan pertumbuhan ekonomi juga akan tercapai.

Teori pertumbuhan klasik juga dapat dilihat apabila terdapat kekurangan penduduk. Jika produksi marginal adalah lebih tinggi daripada perkapita, maka pertambahan penduduk akan

menaikkan pendapatan perkapita. Namun demikian jika terjadi penambahan penduduk yang semakin banyak, maka hukum hasil tambahan yang semakin berkurang dapat mempengaruhi terhadap fungsi produksi, yaitu jika produksi marginal semakin menurun, maka tingkat pendapatan nasional dan pendapatan perkapita juga menjadi semakin lambat pertumbuhannya.

Teori pertumbuhan klasik Ricardo, mengembangkan teori klasik Smith modal yang lebih dalam, baik dalam konsep-konsep maupun dalam hal mekanisme proses pertumbuhan penduduk yang akan menghasilkan produk marginal (*marginal product*) yang semakin menurun lebih dikenal dengan *the law of deminishing return*. suatu peluang yang dapat meningkatnya pertumbuhan ekonomi dengan adanya kemajuan teknologi. Menurut Ricardo proses pertumbuhan ekonomi ialah suatu proses tarik menarik antar kedua kekuatan dinamis yang pada akhirnya dimenangkan oleh *the law of diminishing return*, sehingga dalam teori ini mengemukakan bahwa keterbatasan tanah dapat membatasi pertumbuhan ekonomi.

b) Teori Schumpeter.

Teori Schumpeter menekankan pentingnya peran pengusaha di dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi. Pengusaha adalah sekelompok orang yang akan terus-menerus mewujudkan pembaharuan dan inovasi terbaru dalam kegiatan ekonomi. Pada Teori pertumbuhan Schumpeter membandingkan bahwa

perekonomian yang sedang dalam keadaan yang tidak berkembang. Tetapi kondisi ini tidak berlangsung lama. Pada waktunya kondisi tersebut berlaku, karena sekelompok pengusaha juga telah menyadarinya bahwa terkait tentang mengadakan inovasi akan sangat menguntungkan. Dalam hal ini dapat dorong keinginan untuk mendapatkan keuntungan dengan membuat pembaharuan dan inovasi, dimana investasi yang baru ini dapat meningkatkan kegiatan ekonomi negara.

c) Teori Harrod-Domar

Pada Teori Harrod-Domar bertujuan untuk memenuhi syarat agar perekonomian dapat mencapai pertumbuhan yang konsisten atau *steady growth* dalam jangka panjang. Dalam analisis Harrod-Domar menggunakan pemisalan seperti : 1) barang modal sudah mencapai kapasitas penuh, 2) tabungan ialah proposional dengan pendapatan nasional, 3) rasio modal-produksi (*capital-output rasio*) tetap nilainya, dan 4) perekonomian terdiri dari dua belah sektor. Teori Harrod-Domar dalam analisisnya membuktikan bahwa meskipun barang modal mencapai kapasitas penuh pada tahun tertentu, total pengeluaran pada tahun tersebut juga meningkatkan kapasitas barang modal pada tahun berikutnya. Dengan kata lain, jika investasi yang dihasilkan tahun ini meningkatkan kapasitas barang modal untuk menghasilkan barang dan jasa pada tahun berikutnya.

Dalam teorinya Harrod-Domar tidak melihat ketentuan dalam pencapaian kapasitas yang penuh jika perekonomian terdiri dalam tiga sektor maupun empat sektor. Meskipun berdasarkan pada teorinya jika pengeluaran agregat meliputi komponen yang lebih banyak, yaitu pengeluaran pemerintah dan ekspor. Jika dalam analisis keynesi-an yang diperhatikan adalah analisa persoalan ekonomi jangka pendek, maka dalam teori Harrod-Domar analisis persoalan ekonomi memperhatikan prospek pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Dalam analisis teori Harrod-Domar dapat dilihat bahwa: 1) dalam jangka panjang pertambahan pengeluaran *agregat* yang berkepanjangan perlu dicapai untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi dan 2) pertumbuhan ekonomi yang konsisten hanya mungkin dapat dicapai jika terus menerus bertambah dengan adanya tingkat produksi yang meningkat.

d) Teori Pertumbuhan Neo-klasik

Teori Pertumbuhan Neo-klasik dapat dilihat dari sudut pandangan yang berbeda dari segi penawaran. Menurut teori ini, yang dikembangkan oleh Abramovits dan Solow-Swan pertumbuhan ekonomi juga sangat bergantung pada perkembangan faktor-faktor produksi. Teori Pertumbuhan Neo-klasik menyatakan bentuk analisis pertumbuhan ekonomi dengan persamaan sebagai berikut (Sukirno, 2012 : 437) :

$$\Delta Y = f(\Delta K, \Delta L, \Delta T) \quad (2.1)$$

Dimana :

ΔY : Tingkat Pertumbuhan Ekonomi

ΔK : Tingkat Pertumbuhan Modal

ΔL : Tingkat Pertumbuhan Penduduk

ΔT : Tingkat Perkembangan Teknologi

Teori pertumbuhan yang terpenting dalam Neo-Klasik ini, bukanlah dalam hal menunjukkan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi suatu daerah, tetapi juga dalam menggunakan teori tersebut untuk mengadakan penyelidikan empiris untuk menentukan peranan sebenarnya dari berbagai faktor produksi dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi di suatu daerah.

2.1.3 Faktor-Faktor Yang Menentukan Pertumbuhan Ekonomi

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi (Sukirno, 2012 : 429) yaitu :

a) Tanah dan Kekayaan Alam.

Suatu negara yang memiliki kekayaan alam, luas tanah dan kesuburan tanah, keadaan iklim dan cuaca, jumlah dan jenis hasil hutan dan hasil laut di wilayah tersebut. Negara yang memiliki kekayaan alam yang berlimpah akan dapat mempermudah usaha dalam membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

b) Jumlah Mutu Penduduk dan Tenaga Kerja.

Pertambahan jumlah penduduk dari waktu ke waktu dapat menghambat bagi perkembangan ekonomi. Penduduk yang terus bertambah akan memperbesar jumlah tenaga kerja dan dapat menambah produksi disuatu negara. Disamping itu sebagai akibat peningkatan pendidikan, latihan dan pengalaman kerja, akan membuat keterampilan penduduk menjadi bertambah tinggi. Maka dapat menyebabkan produktivitas yang terus bertambah dan dapat lebih cepat menimbulkan pertambahan produksi dibandingkan pertambahan tenaga kerja.

c) Barang-Barang Modal dan Tingkat Teknologi.

Dunia telah mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, yaitu jauh lebih modern dibandingkan kemajuan yang dicapai oleh masyarakat yang masih belum berkembang. Dalam mewujudkan kemajuan ekonomi yang tinggi barang-barang modal dengan jumlah yang banyak dan teknologi yang bertambah modern telah memegang peranan penting dalam hal ini. Jika barang-barang modal saja yang bertambah, sedangkan tingkat teknologi tidak mengalami perkembangan, maka kemajuan yang akan dicapai ialah jauh lebih rendah dibandingkan yang akan dicapai masa kini. Jika tidak ada perkembangan dalam teknologi, maka barang-barang modal tidak dapat mengalami perubahan dan tetap berada pada tingkat yang paling rendah. Dengan adanya perkembangan

teknologi, produktivitas barang-barang modal akan mengalami sejumlah efek positif pada pertumbuhan ekonomi, oleh karena itu pertumbuhan ekonomi akan meningkat lebih pesat. Berikut beberapa efek utama yang dapat ditimbulkan yaitu:

- 1) Pada kemajuan teknologi saat ini dapat mempertinggi keefesiensian kegiatan produksi pada suatu barang sehingga dapat menurunkan biaya produksi dan dapat meningkatkannya jumlah produksi.
 - 2) Kemajuan pada teknologi dapat menimbulkan penemuan barang-barang baru yang belum di produksi sebelumnya, sehingga akan menambahkan produk dan layanan yang tersedia untuk masyarakat.
 - 3) Kemajuan teknologi juga dapat meningkatkan kualitas produk yang dihasilkan tanpa menaikkan harga produksi.
- d) **Sistem Sosial dan Sikap Masyarakat**

Dalam sistem sosial, sikap masyarakat memegang peranan yang sangat penting dalam mencapai pertumbuhan ekonomi. Dalam menganalisis isu-isu pembangunan di negara-negara berkembang, para ekonomi telah mengakui bahwa sistem sosial dan sikap masyarakat merupakan salah satu hambatan terbesar bagi pembangunan ekonomi. Salah satunya yaitu Adat istiadat yang masih tradisional juga dapat menjadi penghambat terhadap masyarakat dalam menggunakan produksi yang modern dan produktivitas yang tinggi, oleh karena itu pertumbuhan ekonomi tidak bisa dipercepat. Pada sistem sosial

masyarakat sebagian besar tanah yang dimiliki oleh para pemilik tanah maupun luas tanah yang dimiliki lebih kecil dan tidak ekonomis, maka hal ini dalam pencapaian pembangunan ekonomi sangat sulit untuk meningkat.

2.1.4 Indikator Pertumbuhan Ekonomi

Secara umum dalam pertumbuhan ekonomi memiliki beberapa indikator (Hasyim, 2006 : 231) yaitu:

a) **Pendapatan Nasional Riil.**

Pada pendapatan nasional riil terhadap perubahan yang terjadi sering dipakai oleh berbagai macam negara untuk menilai pertumbuhan ekonomi disuatu negara dalam jangka panjang. Negara yang mengalami pertumbuhan ekonomi maka pendapatan nasional riilnya akan meningkat dibandingkan periode sebelumnya.

b) **Pendapatan Riil Perkapita.**

Suatu negara yang mengalami pertumbuhan ekonomi maka akan meningkatnya pendapatan perkapita masyarakat dari waktu ke waktu.

c) **Kesejahteraan Penduduk.**

Meningkatkan kesejahteraan penduduk yang terjadi secara material dalam jangka panjang, dapat terlihat dari lancarnya pendistribusian barang dan jasa di negara tersebut. Dalam hal ini distribusi barang dan jasa yang lancar, dapat menggambarkan bahwa arus distribusi pendapatan perkapita

yang dapat berdampak pada tingkat kesejahteraan penduduk secara menyeluruh di semua wilayah.

d) Tenaga Kerja dan Pengangguran.

Negara berkembang ketika negara tersebut mencapai tingkat kesempatan kerja tertinggi atau full employment ketika tingkat pengangguran kurang dari 4% dari total penduduk negara tersebut.

Indikator pertumbuhan ekonomi lainnya yang umum digunakan adalah data produk domestik bruto (PDB). Ini dapat digunakan untuk mengukur pendapatan total setiap orang dalam perekonomian negara.

2.2 Pengeluaran Konsumsi Pemerintah

2.2.1 Pengertian Pengeluaran Konsumsi Pemerintah

Pengeluaran konsumsi pemerintah merupakan anggaran maupun belanja yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk memenuhi kebutuhan suatu negara dalam mensejahterakan masyarakatnya. Pengeluaran konsumsi pemerintah terdiri dari barang-barang modal, barang konsumsi, dan atas jasa-jasa (Sukirno, 2010 dalam Marselinus, 2020). Pengeluaran konsumsi pemerintah bertujuan untuk mencapai kestabilan ekonomi yang tetap dengan mempertahankan laju pertumbuhan ekonomi. Jika dilihat dari perkembangan kegiatan pemerintah dari tahun ke tahun, terlihat bahwa peranan pemerintah selalu mengalami peningkatan. Semakin meningkatnya peranan pemerintah dalam pembangunan,

maka semakin besar pula pengeluaran konsumsi pemerintah dan proporsinya terhadap pembangunan nasional.

Pengeluaran konsumsi pemerintah berperan sangat penting dalam permintaan masyarakat dengan menyediakan sarana dan prasarana yang tidak dapat dipenuhi oleh pihak swasta. Pengeluaran konsumsi pemerintah dalam hal ini harus terus dikembangkan, karena dapat mengakibatkan penerimaan pada negara harus ditingkatkan. Dalam hal ini pemerintah harus dapat menelusuri sumber-sumber pada penerimaannya yang sebagian besar berasal dari pajak. Sebagian keseluruhan pengeluaran konsumsi pemerintah juga sangat penting dalam pemberiannya terhadap pendapatan nasional, dalam hal ini yang lebih penting ialah penentuan komposisi dari pengeluaran konsumsi pemerintah tersebut. Komposisi dari pengeluaran yaitu perencanaan dalam mencapai sasaran dari pembangunan nasional.

Kebijakan fiskal merupakan komponen dari pengeluaran konsumsi pemerintah ialah tindakan pemerintah dalam mengatur perekonomian di suatu negara dengan menentukan berapa besarnya penerimaan dan pengeluaran pemerintah di setiap tahunnya, yang dapat dilihat dalam dokumen anggaran pendapatan belanja daerah negara (APBN) secara nasional dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) secara daerah atau regional. Kebijakan fiskal ini bertujuan untuk menstabilkan harga, tingkat output, ataupun kesempatan kerja dalam memacu atau mendorong pertumbuhan ekonomi (Sukirno, 2014 : 12).

Pembangunan ekonomi nasional sangat memerlukan peranan pemerintah atau campur tangan pemerintah jika pasar bebas masih sepenuhnya mengatur kegiatan perekonomian, maka kestabilan perekonomian tidak dapat tercapai begitu juga tingkat kesempatan kerja penuh. Namun, fluktuasi kegiatan ekonomi yang luas dari satu periode ke periode lainnya, dapat menimbulkan implikasi yang serius kepada kesempatan kerja, pengangguran dan juga tingkat harga.

Pengeluaran konsumsi pemerintah juga dapat dilihat dari kebijakan pengelolaan keuangan negara melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) ataupun melalui Anggaran Pendapatan dan Daerah (APBD). Jika pemerintah telah menetapkan suatu kebijakan dalam membeli barang dan jasa, maka pengeluaran konsumsi pemerintah dapat dilihat pada biaya yang harus dikeluarkan oleh pemerintah dalam melaksanakan kebijakan tersebut. Pemerintah bukan saja melakukan pengeluaran, tetapi juga mendapatkan penerimaan. Penerimaan dan pengeluaran pemerintah dimasukkan dalam suatu rancangan terpadu dalam hal mengenai pendapatan dan belanja negara. Peranan ini dilakukan dalam bentuk intervensi baik secara langsung maupun tidak langsung.

Sayifullah dan Emmalian, (2018) menyatakan pemerintah seringkali melakukan pengeluaran atau belanja untuk membiayai kegiatan-kegiatannya. Pengeluaran-pengeluaran tersebut tidak hanya untuk melaksanakan kegiatan pemerintahan sehari-hari, akan

tetapi juga membiayai kegiatan perekonomian. Pemerintah tidak turut dalam berbisnis, tetapi pemerintah harus menggerakkan kegiatan perekonomian secara umum dan Pemerintah harus berusaha agar dapat menghindari dan memperbaiki kegagalan di pasar demi tercapainya efisiensi.

Pada dasarnya pengeluaran pemerintah termasuk dalam pengeluaran rutin, yaitu pengeluaran yang berkaitan dengan kegiatan yang sedang berjalan seperti pembiayaan, konsultasi, dan pemeliharaan. Biaya pegawai dan pensiun termasuk dalam biaya ABRI, tunjangan nasi dan lauk serta biaya domestik dan internasional lainnya. Belanja rutin dapat dibagi menjadi beberapa bagian, seperti subsidi untuk daerah otonom, bunga angsuran, dan belanja domestik dan internasional. Biaya pengembangan adalah biaya yang berkaitan dengan kegiatan yang sifatnya tidak tetap dan tergantung pada kebutuhan, yaitu kegiatan yang menghasilkan perbaikan atau peningkatan penting dari sarana atau prasarana yang sedang dikembangkan.

2.2.2 Teori Pengeluaran Konsumsi Pemerintah

Teori makro ekonomi mengenai pengeluaran Konsumsi pemerintah yang dikemukakan oleh para ahli ekonomi, antara lain :

1) Hukum Wagner.

Wagner menyampaikan bahwa apabila suatu perekonomian dengan pendapatan per kapita yang terus meningkat secara relatif maka pengeluaran pemerintah juga akan meningkat.

meskipun Wagner menyadari jika perekonomian semakin meningkat maka hubungan antar industri dan hubungan industri dengan masyarakat menjadi lebih kompleks.

Hukum Wagner memiliki kelemahan yang tidak didasarkan oleh suatu teori yang mengenai dengan pemilihan barang publik, menurut pandangan Wagner dengan teori organis mengenai pemerintah (*organic theory of state*) yang beranggapan bahwa pemerintah dapat melakukan tindakan bebas dan terlepas dari anggota masyarakat lainnya.

2) Teori Peacock dan Wiserman

Berdasarkan pandangan pada Teori Peacock dan Wiserman bahwa pemerintah selalu berusaha untuk memperbesar pengeluaran, sementara itu masyarakat menolak untuk membayar pajak yang semakin besar untuk membiayai pengeluaran pemerintah yang besar tersebut. Namun demikian masyarakat juga memiliki tingkat toleransi pajak yaitu suatu tingkatan yang dimana masyarakat dapat memahami besarnya pungutan pada pajak yang dibutuhkan oleh pemerintah dalam membiayai kegiatan pemerintah sehingga masyarakat mempunyai tingkat kesediaan dalam membayar pajak.

Pada Teori Peacock dan Wiserman, dalam perkembangan ekonomi yang menyebabkan pemungutan pajak dapat semakin meningkat sehingga tarif pajak tidak dapat berubah. Apabila penerimaan pajak semakin meningkat maka pengeluaran pemerintah juga semakin meningkat. Dalam keadaan normal,

Apabila meningkatnya GDP dapat menyebabkan penerimaan pemerintah juga semakin besar dan pengeluaran pemerintah juga menjadi semakin besar.

2.2.3 Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi Pengeluaran Konsumsi Pemerintah

1) Belanja Pemerintah Pusat

Anggaran Belanja Pemerintah Tahun 2008 Belanja Pemerintah Pusat berdasarkan Undang-Undang Nomor 41, Pasal 1 dan 11 Tahun 2009 yaitu antara lain sebagai berikut:

a) Belanja Pegawai.

Belanja pegawai merupakan pengeluaran negara untuk membayar gaji pegawai, tunjangan, honorarium, lembur, tunjangan khusus, belanja pegawai dan asuransi kesehatan (Kontribusi sosial). pada klasifikasi ini termasuk pula belanja gaji/upah proyek yang diklasifikasi sebagai pengeluaran pembangunan. Dalam hal ini, maka akan terlihat pada belanja pegawai yang diklasifikasikan sebagai rutin pembangunan.

b) Belanja Barang.

Belanja Barang ialah belanja yang membiayai semua kegiatan operasional pemerintahan dalam pengadaan barang/jasa, dan pemeliharaan aset negara. Begitu

juga sebaliknya dapat diklasifikasikan dalam pengeluaran pembangunan.

c) Belanja Modal.

Belanja modal ialah seluruh pengeluaran negara yang pengalokasiannya untuk membeli barang-barang kebutuhan Investasi atau dalam bentuk aset tetap dan aset lainnya. Belanja modal dapat dirinci pada belanja modal aset tetap/fisik dan belanja modal aset lainnya/non-fisik. Pada pelaksanaannya selama ini belanja lainnya non fisik secara umum terdiri dari belanja pegawai, bunga dan perjalanan yang tidak terkait langsung dengan investasi untuk pembangunan.

d) Pembayaran Bunga Utang.

Pembayaran bunga utang ialah pembayaran yang terdiri dari utang dalam negeri dan utang luar negeri.

e) Subsidi.

Subsidi mampu menampung apabila seluruh pengeluaran negara dapat dialokasikan dalam membayar beban subsidi atas komoditas untuk menguasai hajat hidup orang banyak, dalam rangka menjaga stabilitas harga agar dapat terjangkau oleh sebagian besar golongan masyarakat.

f) Belanja Hibah.

Belanja Hibah berdasarkan Permendagri No. 59/2007 tentang perubahan permendagri No. 13/2006 pasal 42 ayat 1 adalah belanja hibah dapat digunakan untuk anggaran pemberian hibah dalam bentuk uang, barang dan jasa terhadap pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan yang telah ditetapkan.

g) Bantuan sosial.

Bantuan sosial dapat menampung keseluruhan pengeluaran negara yang telah dialokasikan sebagai uang/ barang yang akan diberikan kepada penduduk untuk melindungi dari kemungkinan terjadi resiko sosial.

h) Belanja Lain-lain

Belanja lainnya, yaitu belanja anggaran yang berkaitan dengan kegiatan yang tidak biasa atau tidak mungkin terulang kembali, yaitu belanja alam, sosial dan tak terduga yang sangat dibutuhkan sehubungan dengan penegakan kewenangan pemerintah pusat atau daerah.

2) Belanja Untuk Daerah.

Untuk belanja daerah, belanja pemerintah pusat dapat dilimpahkan ke daerah dan penggunaannya sepenuhnya

dialokasikan ke daerah tersebut. Seperti sebelumnya, terdiri dari Dana Leveling dan Dana Koordinasi Otonomi Khusus.

2.2.4 Indikator Pengeluaran Konsumsi Pemerintah

Indikator konsumsi pemerintah, antara lain pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial, menjadi elemen kunci dalam upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM). Bakat berkualitas meningkatkan produktivitas dan ekonomi, yang pada gilirannya meningkatkan keberlanjutan pembangunan.

Beberapa Indikator Pengeluaran Konsumsi Pemerintah, sebagai berikut (Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Aceh, 2016-2020) :

1) Pendidikan.

Peningkatan kualitas pendidikan yang pada akhirnya akan meningkatkan kualitas SDM yang tangguh dapat bersaing di era globalisasi dan mampu mendongkrak perekonomian berbasis kerakyatan. Salah satu indikator yang dapat digunakan untuk melihat keberhasilan bidang pendidikan adalah tingkat buta huruf. Makin rendah presentase penduduk yang buta huruf menunjukkan keberhasilan program pendidikan begitu pula sebaliknya.

2) Kesehatan.

Pada pembangunan bidang kesehatan yang terdiri dari seluruh siklus atau tahapan kehidupan manusia. jika pembangunan

kehidupan berjalan dengan baik, sehingga secara langsung atau tidak langsung dapat meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakatnya. Dalam hal ini dapat mempertimbangkan pembangunan dibidang kesehatan ialah bagian yang sangat penting dalam peningkatan SDM penduduk indonesia, oleh karenanya program-program kesehatan telah dimulai dan bahkan diprioritaskan pada generasi penerus saat ini.

3) Perlindungan sosial

Indikator kesejahteraan rakyat tersebut tidak lepas dari berbagai program perlindungan sosial yang telah diluncurkan oleh pemerintah selama ini. konsep perlindungan sosial terbagi menjadi dua dimensi dalam memperluas jaminan sosial, yang terdiri dari serangkaian jaminan sosial program bagi semua orang, serta pelaksanaan secara bertahap dengan standar yang lebih tinggi.

2.3 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

2.3.1 Pengertian Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

Menurut Badan Pusat Statistik (2020) Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah ukuran untuk mengevaluasi penduduk usia kerja dalam suatu perekonomian. Tingkat partisipasi mengacu pada jumlah total individu yang saat ini bekerja atau sedang mencari pekerjaan. Orang yang tidak mencari pekerjaan seperti pelajar penuh waktu, ibu rumah tangga, individu di atas usia 64 tahun.

Menurut Sukirno (2014 : 18) yang dimaksudkan dengan Angkatan Kerja adalah tenaga kerja yang terdapat dalam perekonomian pada suatu waktu tertentu. Angkatan kerja terdiri atas kelompok yang bekerja maupun kelompok yang menganggur atau sedang mencari pekerjaan. Sedangkan yang bukan angkatan kerja ialah individu yang masih sekolah, kelompok individu yang mengurus rumah tangga dan yang tidak menerima pendapatan. Sedangkan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) ialah perbandingan antara jumlah angkatan kerja dengan penduduk dalam usia kerja, yang dimaksud dengan penduduk usia kerja adalah yang telah berusia 15 s/d 64 tahun ke atas yang berpotensi memproduksi barang dan jasa.

Tingkat partisipasi angkatan kerja turun dikarenakan, aktivitas ekonomi sangat rendah yang menghasilkan lebih sedikit pekerjaan di seluruh negeri. Populasi yang menua dapat memiliki dampak negatif pada perekonomian suatu negara. Saat itulah tingkat partisipasi tenaga kerja muncul. Jika tingkat partisipasi angkatan kerja berada di sisi yang lebih tinggi, itu pertanda baik. Tetapi jika berada di sisi bawah, itu juga dapat bertindak sebagai tanda peringatan bagi perekonomian di suatu negara. Oleh karena itu, tingkat partisipasi serta data pengangguran harus dilihat secara bersamaan untuk memahami status pekerjaan secara keseluruhan dalam perekonomian.

Kenaikan TPAK bisa dikarenakan oleh kondisi ekonomi nasional yang tidak stabil, dengan demikian dapat mempengaruhi

terhadap faktor-faktor produksi di Indonesia. Secara langsung naik turunnya produksi dapat memberikan dampak pada tinggi rendahnya faktor permintaan maupun penawaran tenaga kerja. TPAK merupakan faktor yang dapat mempengaruhi besarnya *output* pada suatu kegiatan perekonomian jika masyarakat yang produktif semakin banyak, dengan demikian dapat menghasilkan *output* yang lebih tinggi sehingga dapat mempengaruhi PRDB. Hal ini juga dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi pada pendapatan perkapita dan tingkat konsumsi.

2.3.2 Teori Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

Menurut teori Solow pertumbuhan angkatan kerja sangat mempengaruhi terhadap penambahan penyediaan faktor-faktor produksi (penduduk, tenaga kerja dan modal akumulasi) dalam hal tingkat kemajuan teknologi. Pada teori Solow ini, mengembangkan tentang rasio modal output yang dapat berubah-ubah. Dimana dalam menghasilkan sejumlah output tertentu dapat menggunakan kombinasi dari modal dan tenaga kerja yang berbeda-beda (Arsyad, 2010 : 89).

Kombinasi input modal dan tenaga kerja dapat menghasilkan tingkat produksi yang berbeda dan tingkat efisiensi yang berbeda. Oleh karena itu, kombinasi input modal dan tenaga kerja tertentu dapat menghasilkan produksi optimal yang jauh lebih efisien daripada kombinasi lainnya, dan input yang lebih kecil

menghasilkan produksi dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih positif.

2.3.3 Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi Tingginya TPAK

Faktor – faktor yang turut mempengaruhi tingginya Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) yaitu:

a) **Tingkat Umur.**

Usia yang lebih tua dikaitkan dengan TPAK, dan kaum muda umumnya memiliki tanggung jawab yang lebih kecil sebagai pencari nafkah keluarga dan umumnya bersekolah.

b) **Jumlah Penduduk Bersekolah dan Mengurus Rumah Tangga.**
Semakin banyak orang yang masih bersekolah dengan TPAK dan semakin banyak orang yang bersekolah, semakin kecil angkatan kerja dan semakin kecil TPAK.

c) **Tinggi Pendidikan**

Tingkat pendidikan terkait dengan TPAK. Karena semakin tinggi pendidikan, semakin banyak waktu yang tersedia untuk bekerja.

d) **Tingkat Upah**

Hubungannya dengan tingkat upah TPAK adalah semakin tinggi tingkat upah sosial maka semakin banyak keluarga yang tertarik untuk memasuki pasar tenaga kerja, dengan kata lain semakin tinggi TPAK.

2.3.4 Indikator Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

Menurut David ddk (2019 : 221), menyatakan bahwa indikator yang dapat digunakan untuk menghitung tingkat partisipasi angkatan kerja merupakan rasio antara jumlah angkatan kerja dengan penduduk usia kerja, dengan rumusnya adalah sebagai berikut:

$$TPAK = \frac{\text{Jumlah angkatan kerja}}{\text{jumlah penduduk usia kerja}} \times 100\% \quad (2.2)$$

Angkatan TPAK tidak hanya dapat disajikan untuk menghitung TPAK dari seluruh penduduk usia kerja, namun dapat digunakan untuk menghitung TPAK penduduk usia kerja dengan spesifikasi yang lebih khusus seperti umur, jenis kelamin atau tempar tinggalnya.

2.4 Pengaruh Antar Variabel Penelitian

2.4.1 Pengaruh Pengeluaran Konsumsi Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Regional

Pertumbuhan ekonomi adalah pertumbuhan pendapatan nasional yang dapat terjadi setiap tahun. Di sisi lain, pengeluaran pemerintah merupakan komponen pendapatan nasional. Oleh karena itu, untuk melihat peran pemerintah dalam pertumbuhan ekonomi, kita dapat melihat pengeluaran pemerintah terhadap pendapatan nasional. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi di suatu negara membutuhkan banyak modal, yang dihasilkan dari

pengeluaran pemerintah seperti pengeluaran langsung dan tidak langsung (Haryanto, 2013).

Anggaran belanja langsung adalah biaya yang ditunjukkan untuk meningkatkan modal publik dalam bentuk pembangunan fisik dan non fisik. Belanja tidak langsung, di sisi lain, mendukung kelancaran mekanisme sistem pemerintahan, meningkatkan efisiensi dan produktivitas, serta berperan penting dalam mencapai maksud dan tujuan setiap pembangunan. Pemerintah diharapkan berperan aktif dalam pengelolaan dan pengembangan sektor publik untuk mendorong pertumbuhan ekonomi (Ayulandari, 2019, Susanti, 2010). Peningkatan pengeluaran pemerintah dapat meningkatkan kegiatan ekonomi suatu negara. Dengan kata lain, menurut Hukum Wagner, pengeluaran pemerintah berhubungan positif dengan tingkat pendapatan nasional.

2.4.2 Pengaruh Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Regional

Perekonomian yang berkembang pesat belum tentu dapat menjamin kemakmuran di suatu daerah atau negara, jika negara tersebut tidak di ikuti dengan perluasannya kesempatan kerja dengan menampung tenaga-tenaga kerja baru di setiap tahunnya. Pengaruh angkatan kerja terhadap pertumbuhan ekonomi regional sangat berkaitan erat dengan adanya perluasan kesempatan kerja karena tenaga kerja adalah faktor produksi yang paling penting bagi pertumbuhan ekonomi, selain dipengaruhi oleh modal sumber daya

alam dan teknologi. Oleh sebab itu pertumbuhan penduduk harus dapat seimbang dengan adanya perluasan kesempatan kerja agar angkatan kerja yang ada dapat diserap dalam pasar tenaga kerja.

Menurut Teori Solow, pertumbuhan angkatan kerja sangat bergantung pada penambahan penyediaan faktor-faktor produksi (penduduk, tenaga kerja dan akumulasi modal) dan tingkat kemajuan teknologi. Pada teori ini menjelaskan bahwa rasio modal output sangatlah berubah-ubah. Dalam menghasilkan sejumlah output tertentu dapat menggunakan kombinasi modal dan tenaga kerja yang berbeda-beda (Arsyad, 2010:89). Dapat dijelaskan bahwa TPAK ialah faktor-faktor yang mempengaruhi besaran output pada suatu kegiatan perekonomian jika semakin banyak masyarakat yang produktif, maka dapat menghasilkan output yang lebih tinggi dan turut mempengaruhi pertumbuhan ekonomi.

2.5 Penelitian Terkait

Penelitian terkait sangat penting untuk dilakukan dalam analisis suatu penulisan karya ilmiah. Berdasarkan hasil penelitian terkait yang telah penulis lakukan dalam literatur kepustakaan terdapat beberapa penelitian yang berkaitan dengan topik “Pengaruh Konsumsi Pemerintah dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Regional di Provinsi Aceh” Walaupun terdapat penelitian sebelumnya yang memiliki kesamaan pada penelitian ini, namun ada beberapa perbedaan pada variabel penelitian, tempat dan waktu penelitian

serta objek dari penelitian yang dilakukan. Berikut penelitian terkait yang menyangkut dengan persamaan dan perbedaan di dalam penelitian ini, dapat terlihat pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1
Penelitian Terkait

No	Nama dan Judul Penelitian	Metode Penelitian	Persamaan dan Perbedaan
1	Mia Fadillah, Drs.Ali Anis, MS (2020) “Pengaruh Invenstasi, Angkatan Kerja, Pengeluaran Pemerintah dan Pendidikan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia”	Metode Regresi Linier Berganda Dengan Estimasi Linier Berganda (OLS) Dengan Fixed Effect Model	<ul style="list-style-type: none"> • Persamaan : • Angkatan Kerja • Pertumbuhan Ekonomi • Pengeluaran Pemerintah • Metode Regresi Linier Berganda Dengan Estimasi Linier Berganda (OLS) • Perbedaan : • Investasi • Pendidikan • Lokasi Penelitian di Indonesia
2	Meyvi Rine Mirah, Paulus Kindangen, Ita Pingkan F. Rorong (2020) “Pengaruh Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan di Provinsi Sulawesi Utara”	Metode Deskriptif Kuantitatif Dengan Analisis Regresi Linier Berganda	<ul style="list-style-type: none"> • Persamaan : • Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja • Pertumbuhan Ekonomi • Metode Kuantitatif Menggunakan Data Sekunder • Perbedaan : • Kemiskinan • Lokasi Penelitian di Sulawesi Utara • Menggunakan Data Time Series

Tabel 2.1
Lanjutan

No	Nama dan Judul Penelitian	Metode Penelitian	Persamaan dan Perbedaan
3	Aisyah Safitri, Ariusni (2019) “Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Dan Inflasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Sumatera Barat”	Metode Deskriptif Kuantitatif Analisis Regresi Linier Berganda (OLS)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Persamaan : <ul style="list-style-type: none"> • Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja • Pertumbuhan Ekonomi • Regresi Linier Berganda (OLS) ▪ Perbedaan : <ul style="list-style-type: none"> • Kinerja Keuangan Daerah • Inflasi Lokasi Penelitian di Sumatera Barat
4	Aria Langlang Buana, Herlina Juni Risma Saragih, Sovian Aritonang (2018) “Pengaruh Pengeluaran Pemerintah, Investasi Swasta Dan Tenaga Kerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Pulau Jawa Tahun 2011-2015”	Metode Kuantitatif Dengan Menggunakan Analisis Regresi Linier Berganda	<ul style="list-style-type: none"> • Persamaan : <ul style="list-style-type: none"> • Pengeluaran Pemerintah • Tenaga Kerja • Pertumbuhan Ekonomi • Perbedaan : <ul style="list-style-type: none"> • Investasi Swasta • Lokasi Penelitian Di Pulau Jawa • Analisis Regresi Linier Berganda
5	Ari Tri Afiftah, Winarto Juliprijanto, Rian Destiningsih (2017) “Analisis Pengaruh Pengeluaran Konsumsi Pemerintah Dan Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Terhadap Pertumbuhan Ekonomi	Metode Deskriptif Kuantitatif Analisis Data Time Series Dengan Teknik Analisis Regresi Linier Berganda	<ul style="list-style-type: none"> • Persamaan : <ul style="list-style-type: none"> • Pengeluaran Konsumsi Pemerintah • Pertumbuhan Ekonomi • Metode Kuantitatif Menggunakan Data Sekunder • Perbedaan : <ul style="list-style-type: none"> • Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga • Lokasi Penelitian di Indonesia

Tabel 2.1
Lanjutan

No	Nama dan Judul Penelitian	Metode Penelitian	Persamaan dan Perbedaan
5	Di Indonesia Tahun (1988-2017)”		<ul style="list-style-type: none"> • Metode Deskriptif Kuantitatif Analisis Data Time Series
6	Agus Indrianto Kurniawan, Theresia Militina, Rahmad Budi Suharto (2017) “Pengaruh Investasi Swasta dan Pengeluaran Pemerintah serta Tenaga Kerja Terhadap Pendapatan Asli Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi.”	Metode Analisis Regresi Linier Berganda Yang Menggunakan Logaritma Natural	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Persamaan : <ul style="list-style-type: none"> • Pengeluaran Pemerintah • Tenaga Kerja • Pertumbuhan Ekonomi ▪ Perbedaan : <ul style="list-style-type: none"> • Investasi Swasta • Pendapatan Asli Daerah • Analisis Regresi Linier Berganda Yang Menggunakan Logaritma Natural
7	Merri Anitasri, Ahmad Soleh (2013) “Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Bengkulu.”	Metode Pendekatan Kuantitatif Dan Analisis Ekonometrika Data Skunder Time Series	<ul style="list-style-type: none"> • Persamaan : <ul style="list-style-type: none"> • Pengeluaran Pemerintah • Pertumbuhan Ekonomi • Perbedaan : <ul style="list-style-type: none"> • Lokasi Penelitian Di Provinsi Bengkulu • Analisis Ekonometrika Data Skunder Time Series
8	Tommy Prio Haryanto (2013) “Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2007-2011.”	Metode Kuantitatif Data Skunder Menggunakan Analisis Data Panel	<ul style="list-style-type: none"> • Persamaan : <ul style="list-style-type: none"> • Pengeluaran Pemerintah • Pertumbuhan Ekonomi • Analisis Data Panel • Perbedaan : <ul style="list-style-type: none"> • Lokasi Penelitian di Kabupaten/Kota di

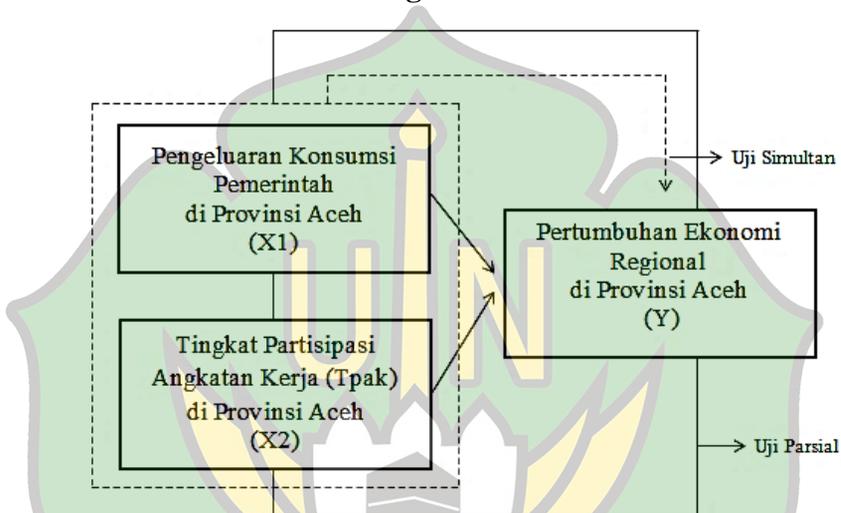
Tabel 2.1
Lanjutan

No	Nama dan Judul Penelitian	Metode Penelitian	Persamaan dan Perbedaan
			Provinsi Jawa Tengah
9	Sayekti Suindyah D (2011) "Pengaruh Investasi, Tenaga Kerja Dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Jawa Timur."	Metode Kuantitatif Analisis Regresi Linier Berganda Yang Menggunakan Logaritma Natural	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Persamaan : <ul style="list-style-type: none"> • Pengeluaran Pemerintah • Pertumbuhan Ekonomi • Tenaga Kerja ▪ Perbedaan : <ul style="list-style-type: none"> • Investasi • Tenaga Kerja • Lokasi Penelitian di Provinsi Jawa Timur • Analisis Regresi Linier Berganda Yang Menggunakan Logaritma
10	Darma Rika Swaramarinda, Susi Indirani (2011) "Pengaruh Pengeluaran Konsumsi Dan Investasi Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia."	Metode Analisis Deskriptif Kuantitatif Terhadap Data Time Series	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Persamaan : <ul style="list-style-type: none"> • Pengeluaran Konsumsi Pemerintah • Pertumbuhan Ekonomi ▪ Perbedaan : <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pengeluaran Investasi Pemerintah ▪ Lokasi Penelitian di Indonesia

2.6 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini secara sistematis dapat digambarkan sebagai berikut :

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran



Sumber : Data Diolah 2021

Gambar 2.1 menunjukkan bahwa variabel pertumbuhan ekonomi sebagai variabel terikat berpengaruh terhadap variabel bebas yaitu: variabel Pengeluaran Konsumsi Pemerintah dan variabel Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). Kedua variabel bebas tersebut yaitu; variabel Pengeluaran Konsumsi Pemerintah dan variabel Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) secara bersama (simultan) berpengaruh terhadap variabel terikat yaitu: Pertumbuhan Ekonomi Regional di Provinsi Aceh.

2.7 Hipotesis

Berdasarkan perumusan masalah, pada landasan teori dan tinjauan terhadap penelitian sebelumnya, maka rumusan hipotesis dalam penelitian ini, sebagai berikut :

H₀₁ : Pengeluaran Konsumsi Pemerintah tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi Regional di Provinsi Aceh.

H_{a1} : Pengeluaran Konsumsi Pemerintah berpengaruh secara signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi Regional di Provinsi Aceh.

H₀₂ : Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) tidak berpengaruh Secara signifikan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Regional di Provinsi Aceh.

H_{a2} : Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) berpengaruh Secara signifikan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Regional di Provinsi Aceh.

H₀₃ : Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Pengeluaran Konsumsi Pemerintah secara bersama (simultan) tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi Regional di Provinsi Aceh.

H_{a3} : Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Pengeluaran Konsumsi Pemerintah secara bersama (simultan) berpengaruh secara signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi Regional di Provinsi Aceh.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Rancangan Penelitian

Rancangan Penelitian ini bersifat kuantitatif, yaitu penelitian yang menjelaskan antar variabel yang menggunakan analisa data dengan statistik dan ekonometrika. Metode kuantitatif merupakan metode penelitian yang bersifat filsafat positivisme, yang dapat digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pada pengumpulan data menggunakan instrument penelitian, analisis data bersifat kuantitatif dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan (Sugiyono, 2017:23).

3.2 Jenis dan Sumber Data Penelitian

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder yang digunakan merupakan data panel yaitu gabungan data *cross section* dan *time series*. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Data Pertumbuhan Ekonomi Regional di Provinsi Aceh (PDRB Aceh) pada tahun 2016 s/d 2020, dalam satuan persen yang diperoleh dari sumber data tahunan Badan Pusat Statistik (BPS) Aceh.
2. Data Pengeluaran Konsumsi Pemerintah di Provinsi Aceh (PDRB Aceh) pada tahun 2016 s/d 2020, dalam satuan persen yang diperoleh dari sumber data tahunan Badan Pusat Statistik (BPS) Aceh.

3. Data Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Provinsi Aceh pada tahun 2017 s/d 2020, dalam satuan persen yang diperoleh dari sumber data tahunan Badan Pusat Statistik (BPS) Aceh. Sedangkan, data di tahun 2016 tingkat kabupaten/kota tidak disediakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Aceh dengan demikian untuk memperoleh data peneliti menginterpolasi data dari tahun 2015 dan 2017.

3.3 Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi merupakan keseluruhan dari variabel yang menyangkut masalah yang diteliti dan mempunyai kuantitas serta karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Sampel merupakan bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut (Sugiyono, 2017:136). Populasi dari penelitian ini adalah seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh, meliputi: Pengeluaran Konsumsi Pemerintah, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Pertumbuhan Ekonomi Regional di Provinsi Aceh. Sampel pada penelitian ini menggunakan data panel yaitu gabungan data *cross section* dan *time series*. Data *cross section* dalam penelitian ini adalah 23 Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh dan data *time series* pada penelitian ini adalah tahun 2016 s/d 2020.

3.4 Variabel Penelitian

3.4.1 Variabel Terikat (Dependen)

Variabel terikat atau (dependent) adalah variabel yang merupakan hasil dari variabel bebas (Sugiyono, 2017:66), dan variabel terikatnya adalah pertumbuhan ekonomi daerah provinsi Aceh (Y).

3.4.2 Variabel Bebas (Independen)

Variabel bebas atau (independen) adalah variabel yang mengubah variabel terikat (Sugiyono, 2017: 66). Variabel bebas dalam penelitian ini adalah konsumsi pemerintah dan tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK).

3.4.3 Definisi Operasional Variabel Penelitian

Berdasarkan klasifikasi dua variabel yang telah dijelaskan di atas, maka selanjutnya akan diuraikan tentang definisi operasional dari dua variabel diatas. adalah sebagai berikut :

No	Variabel	Pengertian	Sumber data	Satuan Data
1	Pertumbuhan Ekonomi	Pertumbuhan Ekonomi ialah dengan adanya investasi-investasi yang dapat memperbaiki kualitas modal maupun sumber daya manusia dan fisik, yang selanjutnya dapat meningkatkan sumber daya produktif dan bisa menaikkan produktivitas seluruh sumber daya dengan adanya penemuan penemuan baru, inovasi dan kemajuan teknologi.	Badan Pusat Statistik (BPS)	Persen

No	Variabel	Pengertian	Sumber data	Satuan Data
		(Todaro dan Smith, 2011: 98).		
2	Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	Pengeluaran konsumsi pemerintah adalah nilai seluruh jenis output pemerintah yang dikurangi dengan nilai output dalam pembentukan modal sendiri dikurangi nilai penjualan barang/jasa (baik yang harganya signifikan dan tidak signifikan secara ekonomi) ditambah nilai barang/jasa yang dibeli dari produsen pasar untuk diberikan pada Rumah Tangga (Badan Pusat Statistik Aceh, 2020).	Badan Pusat Statistik (BPS)	Persen
3	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah menggambarkan jumlah angkatan kerja dalam suatu kelompok umur sebagai persentasi penduduk dalam kelompok umur tersebut (Badan Pusat Statistik Aceh, 2020).	Badan Pusat Statistik (BPS)	Persen

Sumber: Data diolah (2021)

3.5 Model dan Metode Analisis Data

3.5.1 Model Analisis Data

Model Analisis Data dalam penelitian ini menggunakan Data Panel. Basuki & Prawoto (2016:254) menyatakan persamaan data panel dapat ditulis sebagai berikut:

$$Y_{it} = \alpha + \beta_1 X_{it} + \beta_2 X_{it} + e_{it} \quad (3.1)$$

Supaya dapat diestimasi maka persamaan rumus analisis Regresi Linier Berganda dengan Data Panel, sebagai berikut :

$$PE_{it} = \alpha + \beta_1 PKP_{it} + \beta_2 TPAK_{it} + e_{it} \quad (3.2)$$

Keterangan :

PE_{it}	: Pertumbuhan Ekonomi di Kab/Kota
PKP_{it}	: Pengeluaran Konsumsi Pemerintah di Kab/Kota
$TPAK_{it}$: Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Kab/Kota
α	: Konstanta
β_1, β_2	: Koefisien Regresi
i	: <i>Cross Section</i> (Kabupaten/kota)
t	: <i>Time Series</i> (Tahun)
e	: <i>error term</i>

3.5.2 Metode Analisis Data

Dalam regresi data panel terdapat tiga metode yang dapat digunakan dalam mengestimasi model regresi, yaitu model *Common Effect*, model *Fixed Effect* dan model *Random Effect* sebagaimana tertera berikut ini:

1) *Common Effect Model* (CEM)

Metode ini dikenal dengan estimasi *common effect* dengan mengkombinasikan data *cross section* dengan data *time series* dengan metode *Ordinary Least Square* (OLS). Pendekatan ini tidak dapat melihat perbedaan baik antara individu maupun antar waktu atau dalam pendekatan ini tidak memerhatikan dimensi individu maupun waktu. Basuki & Prawoto (2016:255) menyatakan bentuk persamaan *Common effect* adalah sebagai berikut:

$$PE_{it} = \alpha + \beta_1 PKP_{it} + \beta_2 TPAK_{it} + e_{it} \quad (3.3)$$

Keterangan :

PE_{it} : Pertumbuhan Ekonomi di Kab/Kota

PKP_{it} : Pengeluaran Konsumsi Pemerintah di Kab/Kota

$TPAK_{it}$: Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Kab/Kota

α : Konstanta

β_1, β_2 : Koefisien Regresi

i : *Cross Section* (Kabupaten/kota)

t : *Time Series* (Tahun)

e : *error term*

2) *Fixed Effect Model* (FEM)

Pada model ini diasumsikan bahwa adanya perbedaan intersep biasa dengan model regresi *fixed effect*. Teknik model *fixed effect* adalah teknik mengestimasi data panel dengan menggunakan variabel dummy untuk menangkap adanya perbedaan intersep. Adanya variabel-variabel yang tidak semuanya masuk dalam persamaan model memungkinkan adanya intersept yang tidak konstan atau intersept ini mungkin berubah untuk setiap individu dan waktu. Basuki & Prawoto (2016:256) menyatakan bentuk persamaan *fixed effect* adalah sebagai berikut:

$$PE_{it} = \alpha + \beta_1 PKP_{it} + \beta_2 TPAK_{it} + e_{it} \quad (3.4)$$

Keterangan :

PE_{it} : Pertumbuhan Ekonomi di Kab/Kota

PKP_{it} : Pengeluaran Konsumsi Pemerintah di Kab/Kota

$TPAK_{it}$: Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Kab/Kota

α : Konstanta

β_1, β_2 : Koefisien Regresi

i : *Cross Section* (Kabupaten/kota)

t : *Time Series* (Tahun)

e : *error term*

3) *Random Effect Model* (REM)

Pada pendekatan *random effect* ini digunakan untuk mengatasi kelemahan model *Fixed effect* yang merupakan menggunakan variabel *dummy*. Metode analisis data panel dengan model *random effect* harus memenuhi persyaratan yaitu jumlah *cross section* harus lebih besar daripada jumlah variabel penelitian. Teknik ini juga memperhitungkan bahwa *error* mungkin berkorelasi sepanjang *time series* dan *cross section*. Pada analisis *random effect* ini menggunakan satu syarat yaitu objek data silang harus lebih besar dari banyaknya koefisien. Basuki & Prawoto (2016:259) menyatakan bentuk persamaan *random effect* adalah sebagai berikut:

$$PE_{it} = \alpha + \beta_1 PKP_{it} + \beta_2 TPAK_{it} + e_{it} \quad (3.5)$$

Keterangan :

PE_{it} : Pertumbuhan Ekonomi di Kab/Kota

PKP_{it} : Pengeluaran Konsumsi Pemerintah di Kab/Kota

$TPAK_{it}$: Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Kab/Kota

α : Konstanta

β_1, β_2 : Koefisien Regresi

i : *Cross Section* (Kabupaten/kota)

t : *Time Series* (Tahun)

e : *error term*

3.5.3 Pemilihan Model Analisis Data

Pada penelitian ini terdapat tiga model yang telah diestimasi dan akan dipilih model mana yang paling tepat atau sesuai dengan tujuan penelitian. Berikut karakteristik data yang dimiliki, yaitu :

1) *F test (chow test)*

Pada *uji chow* ini digunakan untuk memilih antara model *Common effect model* (CEM) dan *Fixed effect model* (FEM) yang paling tepat digunakan mengestimasi data panel. Dengan ketentuan pengambilan keputusan sebagai berikut :

H_0 : *Common effect model* (CEM)

H_1 : *Fixed effect model* (FEM)

Apabila nilai prob *cross-section* $F > 0.05$ (H_0 diterima)

Apabila nilai prob *cross-section* $F < 0.05$ (H_1 ditolak)

2) *Uji hausman*

Uji hausman digunakan untuk menentukan model manakah yang lebih baik diantara *Random effect model* (REM) dan *Fixed effect model* (FEM) yang sesuai dengan pengambilan keputusan sebagai berikut :

H_0 : *Random effect model* (REM)

H_1 : *Fixed effect model* (FEM)

Apabila nilai prob *cross-section random* > 0.05 (H_0 diterima)

Apabila nilai prob *cross-section random* < 0.05 (H_1 ditolak)

3) *Uji langrange multiplier (LM test)*

Uji langrange multiplier dilakukan untuk melihat apakah model *Random effect model* (REM) lebih baik daripada model *Common effect model* (CEM).

H_0 : *Common effect model* (CEM)

H_1 : *Random effect model* (REM)

Apabila nilai *cross-section breusch-pagan* > 0.05 (H_0 diterima)

Apabila nilai *cross-section breusch-pagan* < 0.05 (H_1 ditolak)

3.6 Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis dilakukan untuk melihat bagaimana pengaruh dari variabel independen terhadap variabel dependen dengan menggunakan Uji Simultan/Fisher (Uji F), Uji Parsial (Uji T) dan Uji Koefisien Determinasi (R^2).

3.6.1 Uji Parsial (Uji T)

Uji T ini digunakan untuk pengujian signifikansi koefisien regresi secara individual terhadap variabel dependen dengan menganggap peubah lain bersifat konstan. Adapun hipotesis yang digunakan pada Uji T yaitu :

H_0 : Variabel independen tidak signifikan terhadap variabel dependen, dengan diterima Prob, > 0.05 (5%).

H_1 : Variabel independen signifikan terhadap variabel dependen, dengan diterima Prob, < 0.05 (5%).

3.6.2 Uji Simultan/Fisher (Uji F)

Pada Uji F ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh semua variabel independen yang terdapat didalam model dengan secara bersama-sama (Simultan) terhadap variabel dependen. Adapun yang menjadi hipotesis Uji F dalam penelitian ini sebagai berikut :

H_0 : Variabel independen tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen, diterima Prob. > 0.05

H_1 : Variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen, diterima Prob. > 0.05

3.6.3 Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi adalah angka yang menunjukkan besarnya variasi variabel terikat yang dapat dijelaskan oleh variabel bebas. Koefisien determinasi berkisar antara 0 sampai 1, dan semakin mendekati 1 maka semakin erat hubungan antara variabel

bebas dengan variabel terikat. Dengan kata lain, variabel bebas dapat diartikan sebagai penjelas yang lebih baik terhadap variabel terikat.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Provinsi Aceh

Aceh adalah sebuah provinsi dan salah satu pulau bagian barat Sumatera dan telah menjadi pintu gerbang strategis untuk perdagangan timur-barat dan transportasi budaya selama berabad-abad. Dengan luas wilayah 57.956.00 km², Aceh memiliki 23 kabupaten/kota yang terdiri dari 18 kabupaten dan 5 kota.

Gambar 4.1
Peta Wilayah Provinsi Aceh



Sumber: Badan Pusat Statistik (2021)

Provinsi Aceh yang menjadi batas wilayah pada bagian utara dan timur yaitu selat malaka, bagian selatan berdampingan dengan provinsi sumatera utara sedangkan bagian barat berdampingan dengan samudera indonesia. Provinsi Aceh memiliki jumlah penduduk sebesar 5.274.871 jiwa di tahun 2020. Berikut tabel jumlah penduduk di provinsi Aceh :

Tabel 4.1
Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh

Kabupaten	Jumlah Penduduk (Jiwa)
Simeulue	92.87
Aceh Singkil	126.51
Aceh Selatan	232.41
Aceh Tenggara	220.86
Aceh Timur	422.40
Aceh Tengah	215.58
Aceh Barat	198.74
Aceh Besar	405.54
Pidie	435.28
Bireuen	436.42
Aceh Utara	602.79
Aceh Barat Daya	150.78
Gayo Lues	99.53
Aceh Tamiang	294.36
Nagan Raya	168.39
Aceh Jaya	93.16
Bener Meriah	161.34
Pidie Jaya	158.40
Banda Aceh	252.90

Kabupaten	Jumlah Penduduk (Jiwa)
Sabang	41.20
Langsa	185.97
Lhokseumawe	188.71
Subulussalam	90.75
Aceh	5.274.871

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh diolah (2021)

Berdasarkan tabel diatas dalam penelitian ini dapat diuraikan bahwa jumlah penduduk tertinggi terdapat pada kabupaten Aceh Utara sebesar 602,79 jiwa. Sedangkan jumlah penduduk terendah berada di kota Sabang sebesar 41,20 Jiwa di Provinsi Aceh.

4.2 Deskripsi Penelitian

Statistik deskriptif bertujuan untuk memberikan informasi sekilas tentang variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian yang dapat digunakan untuk mengetahui mean, maximum, minimum, standar deviasi dan besaran observasi penelitian.

Penelitian ini menggunakan 3 data, yaitu Pertumbuhan Ekonomi, Pengeluaran Konsumsi Pemerintah, dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja selama 5 tahun terakhir, dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 yang terdapat pada tabel berikut:

Tabel 4.2
Pertumbuhan Ekonomi, Pengeluaran Konsumsi Pemerintah
dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Provinsi Aceh
Tahun 2016 s/d 2020 (Persen)

Tahun	Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Aceh (%)	Pengeluaran Konsumsi Pemerintah di Provinsi Aceh (%)	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Provinsi Aceh (%)
2016	3,29	-16,82	64,26
2017	4,18	4,79	63,74
2018	4,61	4,05	64,04
2019	4,14	7,48	63,13
2020	-0,37	-8,06	65,10

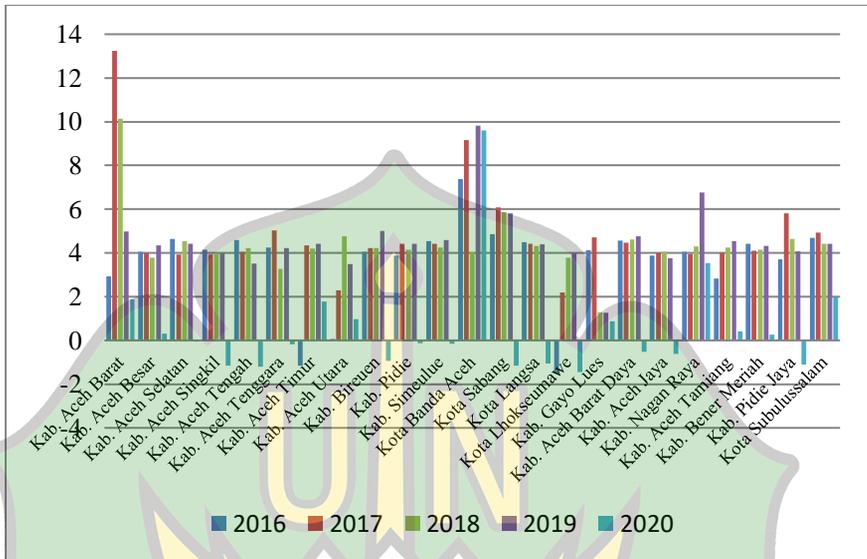
Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh diolah (2021)

Pada tabel 4.2 menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi tertinggi di provinsi aceh terjadi pada tahun 2018 sebesar 4,61% dan paling rendah terjadi di tahun 2020 sebesar -0,37%. Pengeluaran konsumsi pemerintah mengalami kenaikan selama 4 tahun terakhir tetapi pada tahun 2020 mengalami penurunan sebesar -8,06%. serta Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja mengalami naik turun dimana yang paling tinggi berada di tahun 2020 sebesar 65,10%.

4.2.1 Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan Ekonomi adalah salah satu indikator untuk mengukur keberhasilan pembangunan suatu daerah, dimana pertumbuhan ekonomi dapat ditentukan oleh banyaknya output secara agregat hal ini dapat ditandai oleh tingkat kesejahteraan ekonomi masyarakat yang semakin meningkat. Berikut data Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Aceh tahun 2016 s/d 2020 :

Gambar 4.2 Grafik Pertumbuhan Ekonomi Kab/Kota di Provinsi Aceh Tahun 2016 s/d 2020 (Persen)



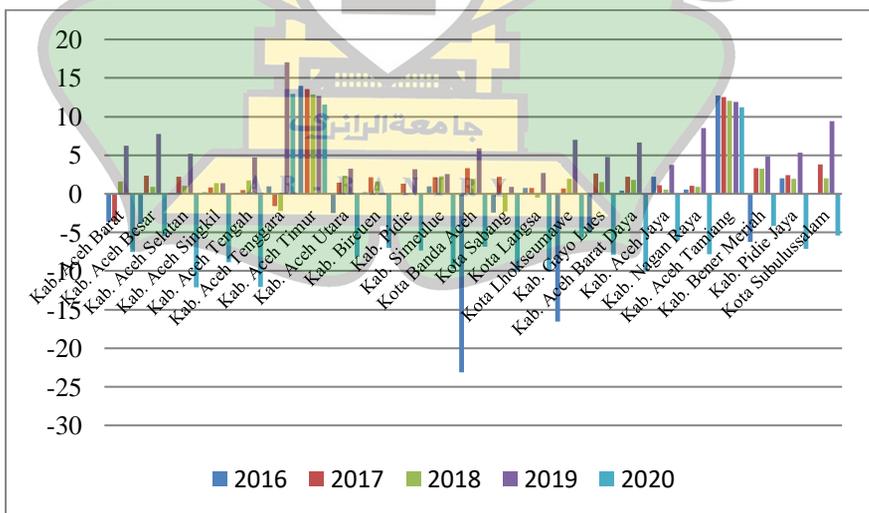
Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) di olah 2021

Berdasarkan Gambar 4.2 dapat dilihat bahwa Pertumbuhan Ekonomi tertinggi di Provinsi Aceh pada tahun 2017 berada di Kabupaten Aceh Barat sebesar 13,23%, dalam kurun waktu 5 tahun terakhir di 23 Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh yang memiliki Pertumbuhan Ekonomi yang tinggi berada di Kota Banda Aceh. Pada tahun 2016 pertumbuhan ekonomi di Kota Banda Aceh sebesar 7,37%, tahun 2017 sebesar 9,17%, tahun 2018 sebesar 4,02%, tahun 2019 sebesar 9,82% dan tahun 2020 sebesar 9,59%. Maka dapat disimpulkan bahwa Kota Banda Aceh jauh lebih unggul dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi dibandingkan Kabupaten/Kota lainnya di Provinsi Aceh.

4.2.2 Pengeluaran Konsumsi Pemerintah

Pengeluaran konsumsi pemerintah sangat besar pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, namun total pengeluaran konsumsi pemerintah untuk kepentingan pembangunan daerah dapat digunakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Kebijakan keuangan pemerintah daerah setiap tahunnya disusun berdasarkan instruksi menteri dalam negeri serta berbagai pertimbangan lainnya dengan maksud agar penyusunan, pemantauan, pengendalian, pemeliharaan, dan evaluasi anggaran tersebut lebih mudah dilakukan. Berikut data Pengeluaran Konsumsi Pemerintah di Provinsi Aceh tahun 2016 s/d 2020 :

Gambar 4.3 Grafik Pengeluaran Konsumsi Pemerintah Kab/Kota di Provinsi Aceh Tahun 2016 s/d 2020 (Persen)



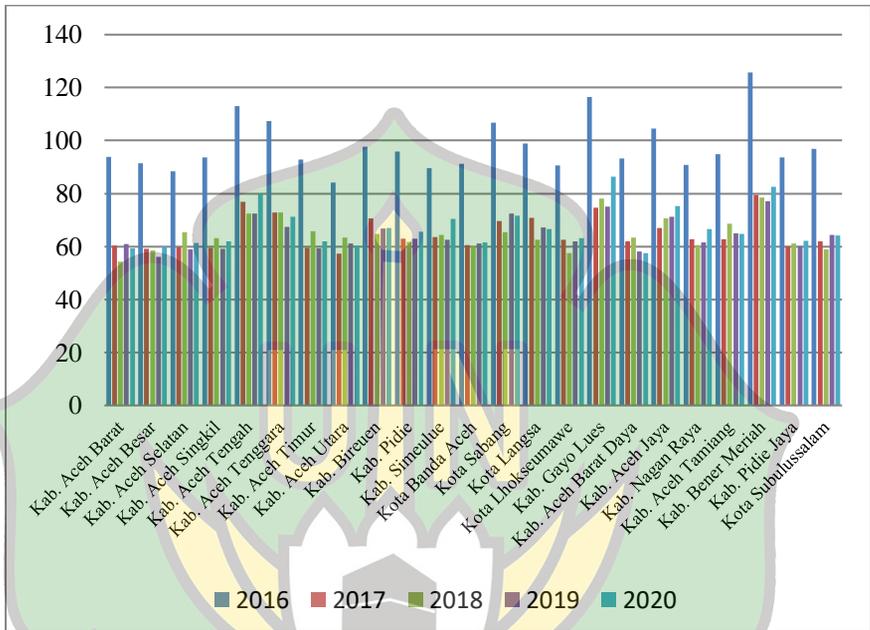
Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) di olah 2021

Berdasarkan Gambar 4.3 dapat dilihat bahwa Pengeluaran Konsumsi Pemerintah tertinggi di Provinsi Aceh pada tahun 2019 berada di Kabupaten Aceh Tenggara sebesar 17,02%, sedangkan dalam kurun waktu 5 tahun terakhir di 23 Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh yang memiliki Pengeluaran Konsumsi Pemerintah yang tinggi berada di Kabupaten Aceh timur. Pada tahun 2016 Pengeluaran Konsumsi Pemerintah di Kabupaten Aceh Timur sebesar 14,02%, tahun 2017 sebesar 13,57%, tahun 2018 sebesar 12,87%, tahun 2019 sebesar 12,69% dan tahun 2020 sebesar 11,55%. Dapat disimpulkan bahwa Kabupaten Aceh Timur jauh lebih unggul dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi dibandingkan Kabupaten/Kota lainnya di Provinsi Aceh.

4.2.3 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Tingkat Partisipasi Angkatan kerja (TPAK) adalah indikator ketenagakerjaan yang menggambarkan perbandingan angkatan kerja dengan penduduk dalam usia kerja. Selain itu, TPAK juga adalah angka yang menggambarkan penyediaan atau penawaran tenaga kerja. Berikut data Tingkat Partisipasi Angkatan kerja (TPAK) di Provinsi Aceh tahun 2016 s/d 2020 :

Gambar 4.4 Grafik Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja kab/Kota di Provinsi Aceh Tahun 2016 s/d 2020 (Persen)



Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) di olah 2021

Berdasarkan Gambar 4.3 dapat dilihat bahwa Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja tertinggi di Provinsi Aceh dalam 5 tahun terakhir di 23 Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh yang memiliki Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja yang tinggi berada di Kabupaten Gayo Lues. Pada tahun 2016 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Kabupaten Gayoe Lues sebesar 116,37%, tahun 2017 sebesar 74,57%, tahun 2018 sebesar 78,05%, tahun 2019 sebesar 75,12% dan tahun 2020 sebesar 86,36%. Dapat disimpulkan bahwa Kabupaten Aceh Timur jauh lebih unggul

dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi dibandingkan Kabupaten/Kota lainnya di Provinsi Aceh

4.3 Hasil Estimasi Regresi Data Panel

Pada penelitian ini menggunakan tiga macam pendekatan estimasi model data panel yang digunakan yaitu, *Common Effect Model* (CEM), *Fixed Effect Model* (FEM) dan *Random Effect Model* (REM). Dalam menentukan model terbaik dapat digunakan untuk melakukan uji chow (*Chow Test*), uji husman (*Hausman Test*) dan uji LM (*Lagrange Multiplier Test*).

4.3.1 Chow Test

Pada uji ini dilakukan untuk menentukan model estimasi terbaik yang dapat digunakan dalam regresi data panel antara *Common Effect Model* dan *fixed Effect Model* Hasil *Chow Test* dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.3
Hasil Chow Test

Redundants Fixed Effects Tests
Equation: Untitled
Test cross-sections fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	3.699597	(22,90)	0.0000
Cross-sections Chi-square	74.075940	22	0.0000

Sumber : Data Diolah dengan E-views (2022)

Berdasarkan tabel 4.3 menunjukkan hasil *Chow Test* bahwa nilai probabilitas *Cross-section F* sebesar 0,0000 atau lebih kecil tingkat signifikansi yang digunakan $\alpha = 5\%$ atau 0,05 sehingga H_0 ditolak H_1 diterima, maka model estimasi regresi data panel yang lebih baik digunakan adalah *Fixed Effect Model*.

4.3.2 Hausman Test

Uji ini menentukan model estimasi yang lebih baik digunakan regresi data panel antara *Fixed Effect Model* dengan *Random Effect Model*. Hasil *Husman Test* dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.4
Hasil Husman Test

Correlated Random Effects - Hausman Test
Equation: Untitled
Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-sections random	14.498545	2	0.0007

Sumber : Data Diolah dengan E-views (2022)

Pada tabel 4.4 menunjukkan bahwa nilai probabilitas *cross-section random* sebesar 0,0007 atau lebih kecil tingkat signifikansi $\alpha = 5\%$ sehingga H_0 ditolak H_1 diterima, maka estimasi model regresi data panel yang lebih baik digunakan adalah *Fixed Effect Model*.

4.4 Hasil Estimasi Data Panel Metode *Fixed Effect Model*

Pada estimasi regresi data panel, maka model terbaik yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Fixed Effect Model*. Dari hasil pengolahan data menggunakan *Fixed Effect Model* mendapatkan hasil sebagai berikut :

Tabel 4.5
Hasil Estimasi Data Panel Metode Fixed Effect Model

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	3.429301	0.185231	18.51362	0.0000
PKP	0.241210	0.035145	6.863222	0.0000
TPAK	-0.000345	0.000331	-1.040883	0.3007
Effects Specification				
Cross-sections fixed (dummy variables)				
R-squared	0.531151	Mean dependent var	3.595739	
Adjusted R-squared	0.406124	S.D. dependent var	2.493983	
S.E. of regressions	1.921947	Akaike info criterion	4.334215	
Sum squared resid	332.4492	Schwarz criterion	4.930939	
Log likelihood	-224.2173	Hannan-Quinn criter.	4.576422	
F-statistic	4.248304	Durbin-Watson stat	1.590586	
Prob(F-statistic)	0.000000			

Sumber : Data Diolah dengan E-views (2022)

Dari model regresi data panel *Fixed Effect Model* (FEM) dapat disimpulkan melalui persamaan sebagai berikut :

$$PE = 3.429301 + 0.241210PKP - 0.000345TPAK + e$$

Keterangan

PE = Pertumbuhan Ekonomi

PKP = Pengeluaran Konsumsi Pemerintah

TPAK = Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Berdasarkan pada tabel 4.5 hasil estimasi data panel dengan metode *Fixed Effect Model* dapat dijelaskan sebagai berikut. *Pertama*, jika selama periode 2016 s/d 2020 Pengeluaran Konsumsi Pemerintah dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja diasumsikan tetap, maka Pertumbuhan Ekonomi Regional di Provinsi Aceh Selama periode penelitian tersebut akan meningkat sebesar 3,429301%.

Kedua, Nilai koefisien Pengeluaran Konsumsi pemerintah (PKP) sebesar 0,241210 artinya apabila setiap kenaikan Pengeluaran Konsumsi Pemerintah sebesar 1 persen, maka akan meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Regional di Provinsi Aceh sebesar 0,241210% dengan asumsi pengeluaran konsumsi pemerintah tetap. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah berpengaruh positif terhadap Pertumbuhan Ekonomi Regional di Provinsi Aceh tahun 2016 s/d 2020.

Ketiga, Nilai koefisien Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) sebesar -0.000345 artinya apabila ada kenaikan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja sebesar 1 persen, maka akan menurunkan nilai Pertumbuhan Ekonomi Regional di Provinsi Aceh sebesar -0.000345% dengan asumsi Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja tetap. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja berpengaruh negatif terhadap Pertumbuhan Ekonomi Regional di Provinsi Aceh tahun 2016 s/d 2020.

4.5 Hasil Uji Signifikasi (Uji T)

Pada Tabel 4.5 dapat dilihat bahwa nilai koefisien variabel Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (X_1) sebesar 0,241210 dengan nilai Probabilitas sebesar 0,0000 lebih kecil dari $\alpha = 0,05$ sehingga H_0 ditolak H_1 diterima. Artinya bahwa variabel Pengeluaran Konsumsi Pemerintah terdapat Pengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi Regional di Provinsi Aceh tahun 2016 s/d 2020. Apabila nilai koefisien bernilai Positif, maka dapat menimbulkan pengaruh positif.

Variabel Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (X_2) sebesar -0.000345 dengan nilai Probabilitas sebesar 0.3007 lebih besar dari $\alpha = 0,05$ sehingga H_0 diterima H_1 ditolak. Artinya bahwa variabel Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja tidak terdapat Pengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi Regional di Provinsi Aceh tahun 2016 s/d 2020. Apabila nilai koefisien bernilai Negatif, maka dapat menimbulkan pengaruh Negatif.

4.6 Hasil Uji Simultan (Uji F)

Pada tabel 4.5 dapat dilihat bahwa nilai F-statistik dalam metode *Fixed Effect Model* sebesar 4.248304 dan nilai Probabilitas sebesar 0,000000 lebih kecil dari $\alpha = 0,05$ sehingga H_0 ditolak H_1 diterima, artinya variabel independen yaitu Pengeluaran Konsumsi Pemerintah dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja berpengaruh secara simultan terdapat variabel dependen yaitu Pertumbuhan Ekonomi Regional di Provinsi Aceh tahun 2016 s/d 2020.

4.7 Hasil Uji Koefisien Determinasi Estimasi R²

Berdasarkan tabel 4.5 dapat dilihat bahwa nilai estimasi R² dalam *Fixed Effect Model* sebesar 0,531151 artinya sebesar 53,11% variabel independen hanya mampu mempengaruhi variabel dependen, sisanya sebesar 46,89% dipengaruhi oleh variabel lain di luar model penelitian.

4.8 Pembahasan Penelitian

4.8.1 Pengaruh Pengeluaran Konsumsi Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Regional di Provinsi Aceh

Pengeluaran pemerintah mencerminkan kebijakan pemerintah. Apabila pemerintah telah menetapkan suatu kebijakan dalam membeli barang dan jasa, pengeluaran pemerintah yang mencerminkan biaya yang harus dikeluarkan oleh pemerintah dalam melaksanakan kebijakan tersebut. Penerimaan dan pengeluaran pemerintah dalam hal ini terdapat pada pendapatan dan belanja negara yang dapat dilakukan dalam bentuk intervensi secara langsung maupun tidak langsung.

Pengeluaran konsumsi merupakan pengeluaran rutin negara dalam hal belanja pegawai. Dana rutin daerah dan pengeluaran rutin lainnya dapat berdampak pada konsumsi pegawai atau masyarakat terhadap barang-barang meningkat yang kemudian dapat menaikkan fungsi konsumsi dan menyumbang kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi. Dalam hal peningkatan belanja

pegawai dapat menyebabkan kenaikan pada produksi yang dapat diukur dengan PDRB.

Berdasarkan hasil penelitian ini diketahui bahwa secara parsial Pengeluaran Konsumsi Pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Aceh, artinya Pengeluaran Konsumsi Pemerintah dapat mempengaruhi kenaikan Pertumbuhan Ekonomi. Kondisi ini mengindikasikan bahwa alokasi anggaran untuk pengeluaran konsumsi pemerintah sudah efisien sehingga kebijakan pengeluaran konsumsi pemerintah telah mendorong pertumbuhan ekonomi. Dan secara tidak langsung pemerintah Aceh telah mengeluarkan anggaran dalam hal pembelian barang dan jasa (belanja barang), pembayaran balas jasa pegawai (belanja pegawai) dan penyusutan barang modal sehingga secara langsung maupun tidak langsung dapat menimbulkan multiplier effect terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Aceh. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ari, Wirnarko dan Rian (2018) dalam analisisnya hubungan dalam Pengeluaran Konsumsi Pemerintah memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi.

Dalam penelitian ini sesuai dengan teori Wagner. Teori Wagner menyatakan bahwa dalam suatu perekonomian, jika pendapatan perkapita meningkat, maka secara relatif pengeluaran pemerintah juga akan meningkat. menurut Wagner peranan pemerintah harus semakin besar, dikarenakan pemerintah harus mengatur hubungan yang akan timbul pada masyarakat, hukum,

pendidikan, rekreasi kebudayaan dan lain sebagainya (Mangkoesubroto 2018: 180)

4.8.2 Pengaruh Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Regional di Provinsi Aceh

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja adalah angka yang menggambarkan perbandingan antara angkatan kerja dengan penduduk usia kerja. Selain itu, TPAK ialah angka yang menggambarkan penyediaan dan penawaran tenaga kerja. Angkatan kerja yaitu penduduk yang sudah memasuki usia kerja yaitu 15 s/d 64 tahun yang bekerja atau punya pekerjaan namun tidak bekerja atau menganggur. Besarnya angkatan kerja tergantung pada Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja yakni berapa persen tenaga kerja yang akan menjadi angkatan kerja dan angkatan kerja itu sendiri adalah bagian dari tenaga kerja yang sesungguhnya terlibat dalam kegiatan produktif yang memproduksi barang dan jasa.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja tidak berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Hal ini tidak sejalan dengan teori, dimana secara teori Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dapat berpengaruh positif namun dalam penelitian ini sebaliknya, karena disebabkan oleh Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Provinsi Aceh tidak sebanding dengan produktifitas masyarakatnya dan karena terbatasnya lapangan pekerjaan yang tersedia serta ketidak sesuaian

keahlian yang dimiliki dengan lowongan kerja. Dengan demikian dapat menyebabkan pengangguran, disaat banyaknya pengangguran maka akan berdampak terhadap Pertumbuhan Pendapatan Nasional. Jadi solusi untuk pemerintah dalam meningkatkan kualitas tenaga kerja di Aceh yaitu : 1) menyediakan pelatihan tenaga kerja, 2) meningkatkan kualitas pendidikan di Provinsi Aceh, 3) mengadakan latihan kerja bagi para tenaga kerja, 4) meningkatkan kualitas dan keterampilan tenaga ahli dalam mengajar atau memberi materi pada calon tenaga kerja.

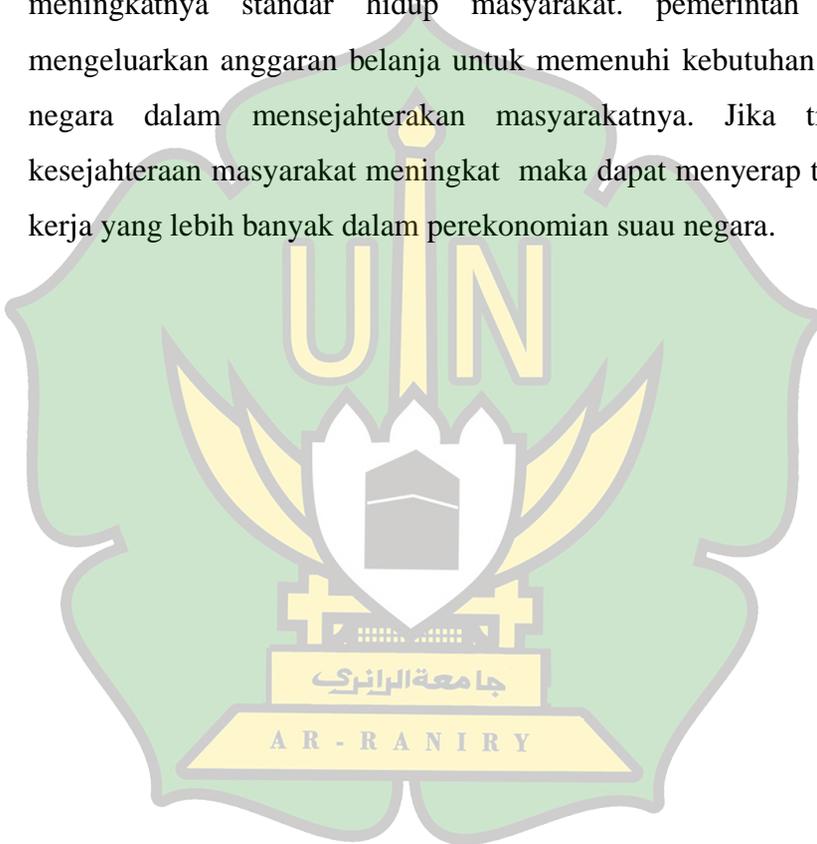
Hasil Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Zulfa dan Farida (2020) yang menjelaskan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja negatif dan tidak signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Apabila penduduk yang semakin bertambah jika tidak diimbangi dengan persediaan lapangan kerja dapat menimbulkan pengangguran yang menyebabkan penurunan produktifitas seseorang.

4.8.3 Pengaruh Secara Simultan Pengeluaran Konsumsi Pemerintah Dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Regional di Provinsi Aceh

Berdasarkan hasil penelitian ini bahwa secara simultan Pengeluaran Konsumsi Pemerintah dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja secara bersama-sama mempengaruhi Pertumbuhan

Ekonomi Regional di Provinsi Aceh, dengan nilai signifikan $0.00 < 0.05$.

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan pesatnya pembangunan ekonomi dapat membawa dampak pada meningkatnya standar hidup masyarakat. pemerintah telah mengeluarkan anggaran belanja untuk memenuhi kebutuhan suatu negara dalam mensejahterakan masyarakatnya. Jika tingkat kesejahteraan masyarakat meningkat maka dapat menyerap tenaga kerja yang lebih banyak dalam perekonomian suatu negara.



BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan mengenai Pengeluaran Konsumsi Pemerintah dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Regional di provinsi Aceh. Maka penulis menarik kesimpulan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah periode 2016 s/d 2020 memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Aceh. jika semakin meningkatnya Pengeluaran Konsumsi Pemerintah maka akan meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi.
2. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Periode 2016 s/d 2020 tidak berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi Regional di Provinsi Aceh.
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja - secara bersama-sama mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi Regional di Provinsi Aceh, dengan nilai signifikan $0.00 < 0.05$.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan, adapun saran yang diberikan penulis sebagai berikut:

1. Pemerintah lebih mengoptimalkan alokasi anggaran dalam hal pembelian barang dan jasa (belanja barang), pembayaran balas jasa pegawai (belanja pegawai) dan penyusutan barang modal untuk pengeluaran konsumsi pemerintah yang lebih efisien sehingga kebijakan pengeluaran konsumsi pemerintah dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di Provinsi Aceh.
2. Pemerintah harus memiliki peranan yang sangat penting dalam Tingkat Partisipasi Angkatan kerja karena perlu adanya peningkatan kualitas tenaga kerja. Solusi untuk pemerintah dalam meningkatkan kualitas tenaga kerja di Provinsi Aceh yaitu : 1) menyediakan pelatihan tenaga kerja, 2) meningkatkan kualitas pendidikan di Provinsi Aceh, 3) mengadakan latihan kerja bagi para tenaga kerja, 4) meningkatkan kualitas dan keterampilan tenaga ahli dalam mengajar atau memberi materi pada calon tenaga kerja.
3. Bagi peneliti selanjutnya dapat menambah variabel lain dalam melakukan penelitian terkait yang mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi, seperti pengeluaran pemerintah, Tenaga Kerja, Jumlah Penduduk dan Variabel-Variabel lainnya sehingga dapat menambah informasi yang lebih maksimal terhadap Penelitian selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus Tri Basuki, Nano Prawoto (2017). *Analisis Regresi Dalam Penelitian Ekonomi & Bisnis*. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Agus Indrianto Kurniawan, Theresia Militina, Rahcmad Budi Suharto (2017) Pengaruh Investasi Swasta dan Pengeluaran Pemerintah Serta Tenaga Kerja Terhadap Pendapatan Asli Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi. Volume 13 (2), 2017.
- Aisyah Safitri, Ariusni (2019) Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dan Inflasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Sumatera Barat. Volume 1, Nomor 2, Mei 2019, Hal 351-564.
- Ali Ibrahim Hasyim, *Ekonomi Makro*, PT Fajar Interpratama Mandiri, Jakarta.
- Ari Tri Afiftah, Winarto Juliprijanto, Rian Destiningsih (2017) Analisis Pengaruh Pengeluaran Konsumsi Pemerintah dan Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia Tahun (1988-2017). Directory Journal Of Economic Volume I Nomer 2.
- Aria Langlang Buana, Herlina Juni Risma Saragih, Sovian Aritonang (2018). Pengaruh Pengeluaran Pemerintah, Investasi Swasta dan Tenaga Kerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Pulau Jawa Tahun 2011-2015. Volume 4 Nomor 2 Tahun 2018.
- Arsyad, Licolin. "*Ekonomi Pembangunan*", Edisi ke 05, STIM YKPN Yogyakarta, 2010.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh www.aceh.bps.go.id (diakses tahun 2020).
- Darma Rika Swaramarinda, Susi Indirani (2011) Pengaruh Pengeluaran Konsumsi dan Investasi pemerintah Terhadap

Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. Volume IX, Nomor 2, Agustus 2011.

Daron Acemoglu, David Laibson, John A. List. *Makro Ekonomi*. Penerbit Erlangga 2019, PT Gelora Aksara Pratama.

Guritno Mangkoesoebroto, 2018. *Ekonomi Publik*. Edisi 3. Yogyakarta. BPFE

Haryanto, Tommy, 2013. Pengaruh Konsumsi Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah 2007-2011. *Economic Development Analysis Journal*, Volume 2 Nomor 3.

Indah Sri Ayulandari Br Tarigan (2019) Pengaruh Konsumsi, Pengeluaran Pemerintah Dan Ekspor Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Sumatera Utara 2019.

James T. McClave, P. George Benson, Terry Sincich (2010) *Statistik Untuk Bisnis dan Ekonomi*. Jakarta : Erlangga.

Marcelinus Marce (2020) Pengaruh Investasi dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Manggarai Barat 2010 – 2019.

Merri Anitasri, Ahmad Soleh (2013) Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Bengkulu. Universitas Bengkulu.

Meyvi Rine Mirah, Paulus Kindangen, Ita Pingkan F. Rorong (2020) Pengaruh Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan di Provinsi Sulawesi Utara. Vol.21 No.1 (2020).

Mia Fadillah, Drs. Ali Anis, MS (2020) Pengaruh Investasi, Angkatan Kerja, Pengeluaran Pemerintah dan Pendidikan Terhadap di Indonesia. Volume 1, Nomor 1, Juli 2020.

- Sadono Sukirno. *Pengantar Teori Makro Ekonomi: Proses, Masalah dan Dasar Kebijakan*, Kencana, Jakarta, 2014.
- Sadono Sukirno. (2012). *Makro Ekonomi Teori Pengantar*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Samuel randy Tapparan (2020) Analisis Pengaruh Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Tana Toraja. Vol 4, No, 2, Oktober 2020.
- Sayekti Suindyah D (2011)Pengaruh Investasi, Tenaga Kerja dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Jawa Timur. Ekuitas Vol. 15 No.4 Desember 2011.
- Sugiyono, (2017). *Metode Penelitian Bisnis*, Bandung: Alfabeta.
- Tommy Prio Haryanto (2013) Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2007-2011. *Economics Development Analysis Journal* 2 (3) (2013).



Lampiran 1

Data Pertumbuhan Ekonomi, Pengeluaran Konsumsi Pemerintah dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Tahun 2016 s/d 2020 (Persen)

Kabupaten/Kota	Tahun	Pertumbuhan Ekonomi	Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	TPAK
Kab. Aceh Selatan	2016	4,64	0,07	88,48
Kab. Aceh Selatan	2017	3,93	2,23	59,7
Kab. Aceh Selatan	2018	4,53	1,04	65,42
Kab. Aceh Selatan	2019	4,43	5,16	59
Kab. Aceh Selatan	2020	-0,05	-12,12	61,41
Kab. Pidie	2016	3,88	0,09	95,86
Kab. Pidie	2017	4,42	1,29	63,05
Kab. Pidie	2018	4,16	0,17	61,73
Kab. Pidie	2019	4,43	3,16	63,05
Kab. Pidie	2020	-0,14	-7,32	65,55
Kab. Simeulue	2016	4,55	0,98	89,56
Kab. Simeulue	2017	4,42	2,12	63,51
Kab. Simeulue	2018	4,24	2,29	64,37

Kabupaten/Kota	Tahun	Pertumbuhan Ekonomi	Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	TPAK
Kab. Simeulue	2019	4,6	2,58	62,5
Kab. Simeulue	2020	-0,15	-9,71	70,37
Kota Langsa	2016	4,49	0,76	98,85
Kota Langsa	2017	4,43	0,73	70,84
Kota Langsa	2018	4,33	-0,47	62,59
Kota Langsa	2019	4,39	2,67	67,24
Kota Langsa	2020	-1,06	-10,09	66,58
Kab. Aceh Barat Daya	2016	4,56	0,4	93,26
Kab. Aceh Barat Daya	2017	4,46	2,21	62,01
Kab. Aceh Barat Daya	2018	4,61	1,8	63,38
Kab. Aceh Barat Daya	2019	4,75	6,64	58,02
Kab. Aceh Barat Daya	2020	-0,52	-9,94	57,58
Kab. Aceh Barat	2016	2,92	-3,61	93,84
Kab. Aceh Barat	2017	13,23	3,41	60,34
Kab. Aceh Barat	2018	10,14	1,56	54,27
Kab. Aceh Barat	2019	4,99	6,2	60,9
Kab. Aceh Barat	2020	1,87	-7,54	59,41

Kabupaten/Kota	Tahun	Pertumbuhan Ekonomi	Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	TPAK
Kab. Aceh Besar	2016	4,05	-3,86	91,48
Kab. Aceh Besar	2017	4,01	2,37	59,17
Kab. Aceh Besar	2018	3,78	0,88	58,51
Kab. Aceh Besar	2019	4,35	7,77	56,18
Kab. Aceh Besar	2020	0,31	-5,45	60,02
Kab. Aceh Singkil	2016	4,16	0,18	93,54
Kab. Aceh Singkil	2017	3,92	0,85	59,43
Kab. Aceh Singkil	2018	3,98	1,38	63,11
Kab. Aceh Singkil	2019	3,99	1,39	59,09
Kab. Aceh Singkil	2020	-1,16	-8,89	61,97
Kab. Aceh Tengah	2016	4,59	0,11	112,98
Kab. Aceh Tengah	2017	4,05	0,50	76,8
Kab. Aceh Tengah	2018	4,22	1,76	72,48
Kab. Aceh Tengah	2019	3,51	4,71	72,5
Kab. Aceh Tengah	2020	-1,21	-12,08	79,96
Kab. Aceh Tenggara	2016	4,24	0,99	107,44
Kab. Aceh Tenggara	2017	5,03	-1,59	72,82

Kabupaten/Kota	Tahun	Pertumbuhan Ekonomi	Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	TPAK
Kab. Aceh Tenggara	2018	3,26	-2,19	72,81
Kab. Aceh Tenggara	2019	4,23	17,02	67,41
Kab. Aceh Tenggara	2020	-0,17	12,93	71,33
Kab. Aceh Timur	2016	-1,16	14,02	92,91
Kab. Aceh Timur	2017	4,34	13,57	59,55
Kab. Aceh Timur	2018	4,2	12,87	65,75
Kab. Aceh Timur	2019	4,42	12,69	59,37
Kab. Aceh Timur	2020	1,79	11,55	61,92
Kab. Aceh Utara	2016	0,07	-2,46	84,25
Kab. Aceh Utara	2017	2,3	1,44	57,21
Kab. Aceh Utara	2018	4,77	2,35	63,39
Kab. Aceh Utara	2019	3,48	3,23	61,17
Kab. Aceh Utara	2020	0,97	-8,17	60,31
Kab. Bireuen	2016	4,04	0,21	97,68
Kab. Bireuen	2017	4,23	2,16	70,61
Kab. Bireuen	2018	4,22	1,62	64,79
Kab. Bireuen	2019	5	3,39	66,88

Kabupaten/Kota	Tahun	Pertumbuhan Ekonomi	Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	TPAK
Kab. Bireuen	2020	-0,94	-7,02	67,06
Kota Banda Aceh	2016	7,37	-23,09	91,27
Kota Banda Aceh	2017	9,17	3,31	60,45
Kota Banda Aceh	2018	4,02	1,91	59,94
Kota Banda Aceh	2019	9,82	5,85	61,13
Kota Banda Aceh	2020	9,59	-6,85	61,54
Kota Sabang	2016	4,85	-2,42	106,18
Kota Sabang	2017	6,07	2,22	69,52
Kota Sabang	2018	5,87	-2,28	65,48
Kota Sabang	2019	5,82	0,92	72,4
Kota Sabang	2020	-1,15	-10,05	71,55
Kota Lhokseumawe	2016	-1,52	-16,52	90,68
Kota Lhokseumawe	2017	2,19	0,67	62,6
Kota Lhokseumawe	2018	3,78	1,92	57,48
Kota Lhokseumawe	2019	3,98	7,02	61,94
Kota Lhokseumawe	2020	-1,45	-5,67	63,17
Kab. Gayo Lues	2016	4,13	-5,07	116,37

Kabupaten/Kota	Tahun	Pertumbuhan Ekonomi	Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	TPAK
Kab. Gayo Lues	2017	4,7	2,64	74,57
Kab. Gayo Lues	2018	1,28	1,54	78,05
Kab. Gayo Lues	2019	1,26	4,81	75,12
Kab. Gayo Lues	2020	0,88	-7,88	86,36
Kab. Aceh Jaya	2016	3,89	2,21	104,5
Kab. Aceh Jaya	2017	4	1,07	66,92
Kab. Aceh Jaya	2018	4,04	0,55	70,7
Kab. Aceh Jaya	2019	3,75	3,75	71,19
Kab. Aceh Jaya	2020	-0,62	-6,01	75,32
Kab. Nagan Raya	2016	4,05	0,52	90,88
Kab. Nagan Raya	2017	3,95	1,01	62,75
Kab. Nagan Raya	2018	4,29	0,88	60,63
Kab. Nagan Raya	2019	6,77	8,51	61,54
Kab. Nagan Raya	2020	3,54	-7,85	66,61
Kab. Aceh Tamiang	2016	2,83	12,74	94,85
Kab. Aceh Tamiang	2017	4	12,54	62,82
Kab. Aceh Tamiang	2018	4,25	12,06	68,7

Kabupaten/Kota	Tahun	Pertumbuhan Ekonomi	Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	TPAK
Kab. Aceh Tamiang	2019	4,55	11,9	65,07
Kab. Aceh Tamiang	2020	0,42	11,21	64,84
Kab. Bener Meriah	2016	4,43	-6,21	125,68
Kab. Bener Meriah	2017	4,09	3,34	79,49
Kab. Bener Meriah	2018	4,16	3,26	78,43
Kab. Bener Meriah	2019	4,32	4,87	77,05
Kab. Bener Meriah	2020	0,26	-4,17	82,52
Kab. Pidie Jaya	2016	3,7	1,98	93,7
Kab. Pidie Jaya	2017	5,8	2,40	60,12
Kab. Pidie Jaya	2018	4,63	1,94	61,17
Kab. Pidie Jaya	2019	4,08	5,35	60,21
Kab. Pidie Jaya	2020	-1,11	-7,13	62,13
Kota Subulussalam	2016	4,69	0,09	96,82
Kota Subulussalam	2017	4,93	3,82	61,85
Kota Subulussalam	2018	4,42	1,99	58,93
Kota Subulussalam	2019	4,42	9,41	64,43
Kota Subulussalam	2020	1,97	-5,37	64,18

Lampiran 2

Common Effect Model (CEM)

Dependent Variable: PERTUMBUHAN_EKONOMI

Method: Panel Least Squares

Date: 02/25/22 Time: 14:40

Sample: 2016 2020

Periods included: 5

Cross-sections included: 23

Total panel (balanced) observations: 115

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	3.512746	0.227345	15.45119	0.0000
PKP	0.126707	0.034640	3.657837	0.0004
TPAK	-0.000215	0.000367	-0.585906	0.5591
R-squared	0.107149	Mean dependent var		3.595739
Adjusted R-squared	0.091205	S.D. dependent var		2.493983
S.E. of regression	2.377533	Akaike info criterion		4.595745
Sum squared resid	633.0983	Schwarz criterion		4.667351
Log likelihood	-261.2553	Hannan-Quinn criter.		4.624809
F-statistic	6.720399	Durbin-Watson stat		0.980326
Prob(F-statistic)	0.001752			

جامعة الرانري

AR - RANIRY

Lampiran 3

Fixed Effect Model (FEM)

Dependent Variable: PERTUMBUHAN_EKONOMI

Method: Panel Least Squares

Date: 02/25/22 Time: 14:45

Sample: 2016 2020

Periods included: 5

Cross-sections included: 23

Total panel (balanced) observations: 115

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	3.429301	0.185231	18.51362	0.0000
PKP	0.241210	0.035145	6.863222	0.0000
TPAK	-0.000345	0.000331	-1.040883	0.3007

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared	0.531151	Mean dependent var	3.595739
Adjusted R-squared	0.406124	S.D. dependent var	2.493983
S.E. of regression	1.921947	Akaike info criterion	4.334215
Sum squared resid	332.4492	Schwarz criterion	4.930939
Log likelihood	-224.2173	Hannan-Quinn criter.	4.576422
F-statistic	4.248304	Durbin-Watson stat	1.590586
Prob(F-statistic)	0.000000		

جامعة الرانري

AR - RANIRY

Lampiran 4

Random Effect Model (REM)

Dependent Variable: PERTUMBUHAN_EKONOMI
 Method: Panel EGLS (Cross-section random effects)
 Date: 02/25/22 Time: 14:48
 Sample: 2016 2020
 Periods included: 5
 Cross-sections included: 23
 Total panel (balanced) observations: 115
 Swamy and Arora estimator of component variances

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	3.470673	0.292731	11.85618	0.0000
PKP	0.184444	0.031808	5.798692	0.0000
TPAK	-0.000281	0.000317	-0.885893	0.3776
Effects Specification				
			S.D.	Rho
Cross-section random			1.089703	0.2433
Idiosyncratic random			1.921947	0.7567
Weighted Statistics				
R-squared	0.213578	Mean dependent var	2.226848	
Adjusted R-squared	0.199535	S.D. dependent var	2.264870	
S.E. of regression	2.026350	Sum squared resid	459.8827	
F-statistic	15.20860	Durbin-Watson stat	1.202536	
Prob(F-statistic)	0.000001			
Unweighted Statistics				
R-squared	0.084669	Mean dependent var	3.595739	
Sum squared resid	649.0378	Durbin-Watson stat	0.852070	

Lampiran 5

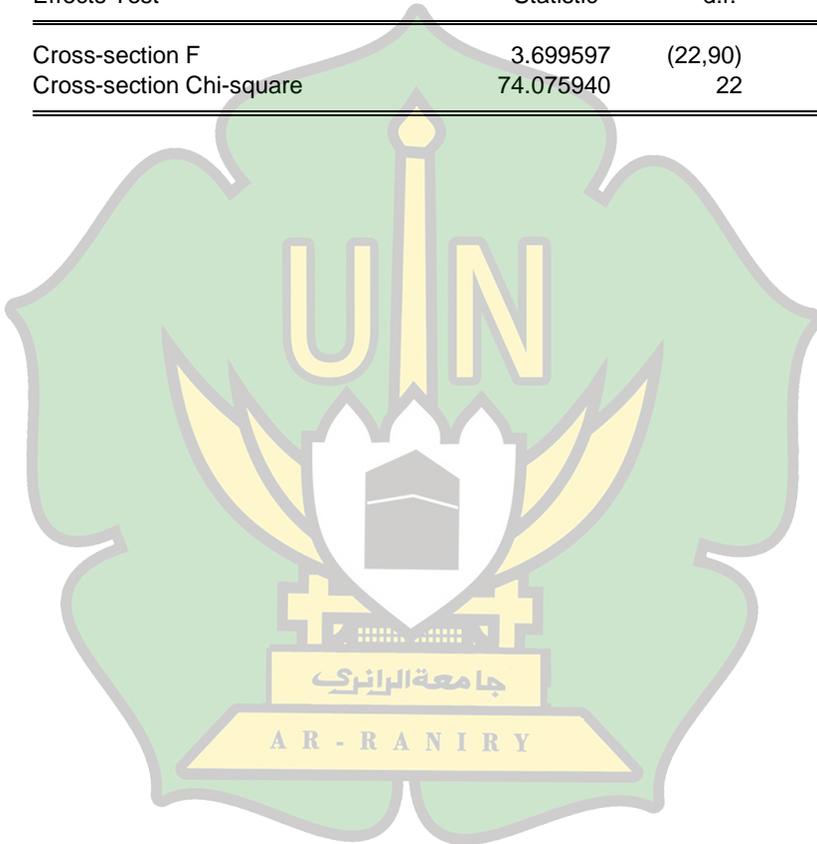
Chow Test

Redundant Fixed Effects Tests

Equation: Untitled

Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	3.699597	(22,90)	0.0000
Cross-section Chi-square	74.075940	22	0.0000



Lampiran 6

Hausman Test

Correlated Random Effects - Hausman Test
Equation: Untitled
Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	14.498545	2	0.0007

